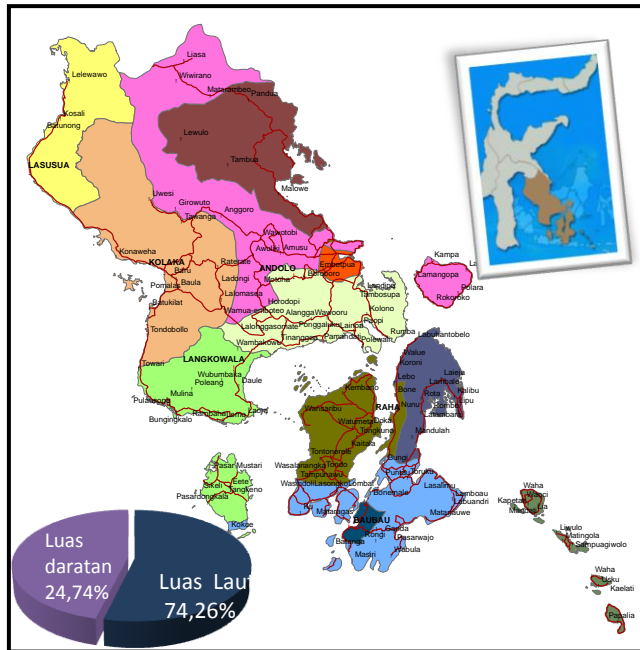




BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi



2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total luas wilayah 153.019 km², meliputi luas daratan 38.140 km² dan luas laut 114.879 km². Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. 39% penduduk Sulawesi Tenggara bermukim di kepulauan.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Barat : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Laut Flores (Provinsi NTT)

Sebelah Timur : Laut Banda (Provinsi Maluku)

Secara administratif Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi 17 kabupaten/kota, 209 kecamatan, 371 kelurahan dan 1.874 desa. Hingga Tahun 2014 penduduk Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 2.448.081 jiwa.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Sulawesi Tenggara terletak di selatan garis khatulistiwa pada 02° 45' – 06° 15' LS dan 120° 25' - 124° 45' BT, terdiri atas jazirah dan kepulauan. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu $\pm 74\%$ sedang selebihnya datar sampai berombak $\pm 26\%$.

Tabel 1. Kondisi Topografi Wilayah Sulawesi Tenggara

Kondisi Tanah	Luas (km ²)	Luas (%)
Dataran sampai berombak	9.916,40	26
Tanah berbukit	9.535,00	25
Pegunungan relatif rendah	18.688,60	49
Jumlah	38.140,00	100

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015



2.1.1.3. Topografi

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang hingga bergunung. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut :

- Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 ha.
- Dataran Rate-rate-Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 ha.
- Dataran Waworamo-Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 ha.
- Dataran Tinanggea-Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
- Dataran Lalindu-Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
- Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
- Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
- Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.
- Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.
- Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.
- Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.
- Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 ha.

Kondisi kelerengan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi dengan kondisi kelerengan 0-40 % seluas kurang lebih 72,23 persen dari luas daratan, secara rinci tingkat kelerengan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Kelerengan Wilayah**

Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
0 – 2	894.790	23,16
3 – 15	606.657	15,91
15 – 40	1.253.316	32,86
> 40	1.059.237	27,77
Jumlah	3.814.000	100,00

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.1.1.4. Geologi

Kondisi batuan terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan sedimen, batuan metamorfosis dan batuan beku. Luas masing-masing jenis batuan tersebut adalah batuan sedimen seluas 2.579.790 ha, batuan metamorfosis seluas 754.409 ha dan batuan beku seluas 479.801 ha.

Terdapat 6 (enam) jenis tanah yaitu tanah podzolik seluas 2.299.729 ha atau 60,30 ha persen dari luas tanah di Sulawesi Tenggara, tanah mediteran seluas 898,802 ha (23,57 %) tanah latosol seluas 349,784 ha (9,17 %), tanah alluvial seluas 129.569 ha (3,40%), tanah organosol seluas 116.099 ha (3,04 %), dan tanah gromusol seluas 20.017 ha (0,52%).

2.1.1.5. Hidrologi

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar maupun sungai kecil yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan air bersih, irigasi, pembangkit listrik, dan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Beberapa sungai besar seperti Sungai Konaweha di Konawe, Sungai Lasolo di Konawe Utara, Sungai Tamboli di Kolaka, memiliki debit air hingga 200 m³ per detik.

Selain sungai di atas masih banyak sungai-sungai di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain Sungai Lalindu, Sungai Roraya, Sungai Sampolawa, Sungai Wandasa, Sungai Kabangka Balano dan lain-lain. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa



yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

2.1.1.6. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu :

Tabel 3. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Tipe Iklim	Wilayah
1	B	Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara) Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan) Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara) Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)
2	C	Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe) Sekitar Kecamatan Lainea, Tinangea dan Konda (Kab. Konawe Selatan) Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako dan Mowewe (Kab. Kolaka) Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton) Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana) Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau) Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)
3	D	Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe) Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinangea, Landono, Angata (Kab. Konawe Selatan) Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka) Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton) Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Buton) Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau) Sekitar Kota Kendari Sekitar Kecamatan Tipek dan Lawa (Kab. Muna)
4	E	Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton) Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
5	G	Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

Tabel 4. Keadaan Hari Hujan dan Curah hujan di Beberapa Daerah di Sulawesi Tenggara

Bulan	Pasarwajo		Raha		Baubau		Pomalaa		Andoolo		Kendari	
	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH
Januari	-	-	8	190,00	18	138,60	22	106,30	18	141,90	15	246,60
Februari	15	775	7	382,00	13	178,70	16	160,80	18	159,10	16	203,30
Maret	16	820	14	465,00	14	151,10	19	190,40	22	208,40	21	224,50
April	15	1.165	15	395,00	8	103,60	21	216,90	24	112,20	15	216,70
Mei	16	1.720	15	992,00	12	55,20	21	271,10	19	135,40	11	30,60
Juni	15	1.254	11	1.224,00	8	41,20	16	93,20	16	151,40	11	35,90
Juli	14	2.159	8	324,00	6	70,30	11	153,20	11	221,30	9	148,80
Agustus	4	67	8	139,00	1	0,40	5	23,10	5	10,70	3	1,00
September	-	-	5	37,00	2	31,80	7	2,10	3	20,00	4	4,00
Oktober	2	325	5	68,00	1	1,00	10	108,50	6	42,10	2	1,50
November	4	426	12	245,00	5	33,70	14	220,10	15	61,20	11	72,10
Desember	8	1.359	12	187,00	19	288,20	20	243,00	26	468,90	19	234,10
Jumlah	109	10.070	120	4.648,00	107	1.093,80	182	1.788,70	183	1.732,60	137	1.419,10

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2014

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

a) Kawasan Budidaya

Total penggunaan tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah seluas 3.813.993 ha, yang terbagi ke dalam 8 (delapan) jenis, yaitu : tanah sawah seluas 93.113 ha, bangunan dan halaman sekitarnya seluas 145.914 ha, tanah tegalan/kebun seluas 214.306, tanah



ladang/huma seluas 116.268 ha, tanah padang rumput 95.094 ha, tanah rawa yang tidak ditanami 61.757 ha, tambak, kolam, tebat dan empang seluas 19.161 ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 314.093 ha, lahan tanaman kayu-kayuan seluas 306.314 ha tanah hutan negara seluas 1.753.121 ha, tanah perkebunan seluas 381.604 ha dan lainnya 313.25 ha.

b) Kawasan Lindung

Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano
- Cagar Alam Lamedai
- Cagar Alam Kakinawe
- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara
- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
- Taman Nasional Laut Wakatobi
- Taman Wisata Alam Mangolo
- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
- Taman Buru Mata Osu

2.1.1.9. Flora dan Fauna

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam berupa fauna (binatang) yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di Indonesia. Jenis binatang khas atau spesifik di daerah ini antara lain adalah Anoa, Babi Rusa dan Burung Maleo yang merupakan satwa langka sehingga mendapat perlindungan yang ketat. Binatang lain yang hidup di Sulawesi Tenggara adalah Monyet, Musang, Rusa, Ular, Babi Hutan, Burung Nuri dan Kakatua.

Jenis-jenis Flora endemik di Sulawesi Tenggara adalah kayu kuku (*Pericopsis mooniana*) dan jenis komersil lainnya seperti kayu besi, kayu hitam, palapi, jati, rotan dan lain-lain.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari biosfir, terdiri dari berbagai ekosistem daratan dan lautan yang merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari.

2.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti: perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas :

- 1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah



- elayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Konawe bagian selatan;
- 2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
 - 3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Konawe Kepulauan;
 - 4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara bagian selatan; dan
 - 5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Konawe bagian utara.
- b. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
 - c. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
 - f. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - g. Kawasan industri semen di Pulau Muna;
 - h. Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
 - i. Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pusat-pusat kegiatan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 5. Pusat-pusat kegiatan di Sulawesi Tenggara

No.	Pusat - Pusat Kegiatan	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kendari (I/B/1)
2	Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Baubau (I/B/1)
3	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Unaaha (II/B/1)
		Lasolo (II/B/1)
		Raha (II/B/1)
		Kolaka (II/B/1)
4	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Pasarwajo (II/B/1)
		Wangi-Wangi (II/B/1)
5	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pomalaa
		Langara
		Usuku
		Kasipute
		Sikeli
		Lasusua
		Andoolo
		Wanggudu
		Perkotaan Buranga dan sekitarnya
		Tirawuta
		Laworo

2.1.2.1. Pertanian dan Perkebunan

Produksi padi dan palawija di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Produksi Padi dan Palawija Provinsi Sulawesi Tenggara

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produksi Padi	405.256	407.367	454.644	476.472	516.291	561.361	657.617
Produksi Palawija	354.071	335.994	272.540	320.592	293.562	281.991	272.106
Total (Ton)	759.327	743.361	727.184	797.064	809.853	843.352	929.723

Sumber : Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra Tahun 2015



Peningkatan produksi daging dan telur juga terus terjadi peningkatan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2014, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 7. Produksi Daging dan Telur Provinsi Sulawesi Tenggara

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ternak Besar (kg)	3.464.648	3.841.294	3.984.748	4.252.113	267.365	3.873.050	4.402.319
Ternak Kecil (kg)	839.513	1.060.927	1.109.219	1.185.007	75.788	463.727	408.270
Telur Unggas (kg)	7.658.400	7.064.614	8.170.987	8.328.774	157.787	9.842.476	8.000.829

Sumber : Dinas Pertanian & Peternakan Prov. Sultra, Tahun 2015

Perkembangan produksi tanaman perkebunan kakao sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan produksi, hal ini disebabkan oleh serangan hama dan umur tanaman yang tidak lagi produktif. Karena itu, sejak tahun 2011 telah dilaksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Kakao (GERNAS Kakao) dan pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan. Perkembangan produksi kakao di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8. Produksi Kakao Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Produksi Kakao (Ton)
2007	134.755
2008	115.898
2009	131.830
2010	145.818
2011	133.323
2012	148.746
2013	157.537
2014	161.516

Sumber: Disbun & Hortikultura Prov. Sultra, Tahun 2015

2.1.2.2. Perdagangan

Realisasi perdagangan antar pulau dalam bentuk hasil bumi dan hasil laut sejak tahun 2008 hingga 2011 memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan dari sisi volume maupun nilai tambahnya. Pada tahun 2008 nilai perdagangan antar pulau tercatat Rp. 3,64 milyar naik menjadi Rp. 4,25 milyar pada tahun 2011. Secara rinci volume dan nilai perdagangan antar pulau Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 – 2014 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Realisasi Perdagangan Hasil Bumi dan Hasil Laut Antar Pulau

No.	Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	2007	179.062.48	3,401,198,037.000
2	2008	209,775.92	3,649,466,292.000
3	2009	178,506,643.55	4,352,443,912.000
4	2010	195,957,826.60	4,055,504,507.000
5	2011	205,275,892.95	4,254,101,294.000
6	2012	-	4,090,232,717.400
7	2013	-	6,465,471,170.000
8	2014	327,839	7,437,659,148.000

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015

Komoditas ekspor Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014, meliputi hasil tambang nikel, hasil perkebunan yaitu kakao dan jambu mete serta hasil laut seperti ikan, rumput laut dan lain-lain. Dalam periode tersebut rata-rata kenaikan nilai ekspor sebesar 2,41% per tahun, walau pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor. Keadaan volume dan nilai ekspor tahun 2008 – 2014 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 10. Volume dan Nilai Ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014

No.	Tahun	Volume (Ton)	Nilai (\$ US)
1	2008	2.337.816,43	463.197.880,00
2	2009	2.034.241,81	199.898.650,00
3	2010	3.069.386,60	334.550.042,20
4	2011	5.783.210,56	440.772.202,74
5	2012	14.053.328,97	703.334.264,44
6	2013	22.179.857,10	765.857.144,55
7	2014	1.896.916,65	333.012.160,80

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015

2.1.2.3. Perkoperasian

Perkembangan perkoperasian di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2008 – 2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan baik jumlah lembaga koperasi, anggota, omset dan aset. Hingga Tahun 2014 jumlah koperasi tercatat 3.561 unit dengan jumlah anggota mencapai 330.679 orang. Total aset yang dimiliki adalah sebesar Rp. 332.677.000.000,- dengan omset sebesar Rp. 387.102.000.000,-

2.1.2.4. Perindustrian

Pertumbuhan industri besar dan industri sedang serta jumlah tenaga kerja dan pengeluaran untuk tenaga kerja disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Pertumbuhan Industri di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Jumlah Industri Besar dan Sedang	Tenaga Kerja	Pengeluaran Untuk Tenaga Kerja (Rp. 000)	Nilai Tambah Harga Pasar (Rp.000)
2008	81	5.230	284.586.887	6.772.017.703
2009	71	4.504	182.344.832	2.157.610.226
2010	78	4.533	183.548.107	2.641.288.112
2011	78	4.543	183.082.350	2.674.412.954
2012	80	4.442	237.674.340	3.855.484.378
2013	78	4.577	192.494.022	2.905.837.783
2014	86	4.865	60.766.671	3.778.061.622

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

Jumlah industri kecil serta tenaga kerja, investasi dan nilai produksi meningkat pesat dalam kurun waktu Tahun 2008 – 2014. Keadaan pertumbuhan industri kecil yang merupakan industri hasil pertanian, kehutanan, logam dan mesin serta industri aneka ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 12. Keadaan Industri Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi
2008	10.221	63.595	798.023.313	2.662.751.132
2009	10.727	57.132	1.130.102.684	2.862.598.413
2010	12.083	68.197	1.373.246.496	2.820.034.519
2011	12.936	69.840	1.413.670.317	3.280.676.196
2012	12.276	69.206	1.279.775.841	3.087.247.619
2013	11.264	58.109	1.197.100.148	2.624.606.235
2014	11.311	58.302	1.212.925.248	2.668.891.793

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015



2.1.2.5. Pertambangan

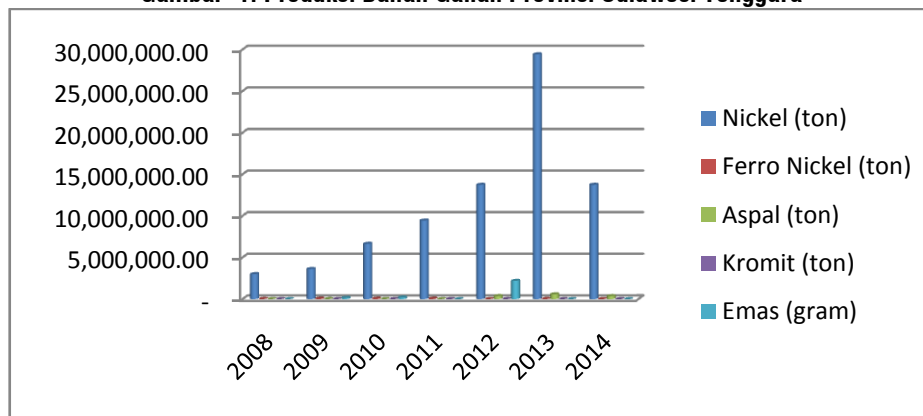
Tambang nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 13. Data Produksi Bahan Galian Provinsi Sulawesi Tenggara

Jenis Bahan Galian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nickel (wmt)	3.001.588,00	3.622.644,39	6.647.122,55	9.442.735,98	13.743.802,00	29.431.004,00	13.743.802,00
Ferro Nickel (wmt)	17.566,53	57.151,53	51.908,00	52.225,00	6.875,00	18.249,00	6.875,00
Aspal (wmt)	0,00	11.858,93	7.051,13	0,00	360.568,00	583.830,00	360.568,00
Kromit (wmt)	0,00	0,00	1.000,00	2.460,00	7.298,00	-	-
Emas (gram)	0,00	153.348,42	198.816,09	789,46	2.190.206,13	171.000	91.000

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015

Gambar 1. Produksi Bahan Galian Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Hasil Olahan, 2015

2.1.2.6. Listrik

Pertumbuhan permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara signifikan dengan penambahan cabang dan ranting perusahaan listrik negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14. Perkembangan Kelistrikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	493.598	529.977	547.924	547.890	524.017	546.024	607.186
Jumlah KK berlistrik	183.421	198.280	255.813	307.351	324.630	379.629	449.713
Rasio Elektrifikasi	37,16	41,00	46,69	56,13	61,95	69,53	74,07

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015

Meningkatnya daya terpasang pada tahun 2010 samapai 2014, disebabkan oleh selesainya terbangun PLTU Nii Tanasa di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dengan kapasitas 10.000 MW, sehingga meningkatnya rasio elektrifikasi dari 45% menjadi 59%.



2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Jenis bencana alam yang potensial terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi : gempa bumi, banjir air, angin topan, gelombang pasang/tsunami, tanah longsor, kebakaran dan abrasi. Lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi kawasan Pulau Muna bagian barat dan selatan, Pulau Buton, Kolaka Utara, Konawe Selatan bagian timur, Kota Kendari dan Pulau Wawonii. Sedangkan lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gelombang pasang/tsunami meliputi kawasan pesisir Pulau Muna bagian barat dan selatan, Pulau Buton bagian selatan dan Kepulauan Wakatobi.

Adapun bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan laut sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.

2.1.4. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau entitas tertentu.

Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Tabel 15. Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
			Kecamatan	Desa/Kel.
1	Konawe	5.798,94	23	341
2	Kolaka	2.916,42	12	135
3	Muna ¹	2.890,41	33	238
4	Buton ²	2.675,25	21	242
5	Kota Kendari	295,89	10	64
6	Kota Baubau	305,70	8	43
7	Konawe Selatan	4.514,20	22	351
8	Kolaka Utara	3.391,62	15	133
9	Bombana	3.056,08	22	140
10	Wakatobi	425,97	8	100
11	Buton Utara	1.996,59	6	90
12	Konawe Utara	4.877,46	10	147
13	Kolaka Timur	4.001,96	12	133
14	Konawe Kepulauan	993,51	7	76
15	Muna Barat	-	11	86
16	Buton Tengah	-	7	77
17	Buton Selatan	-	7	70
Jumlah		38.140,00	209	2.245

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

¹ termasuk Muna Barat

² termasuk Buton Tengah dan Buton Selatan



Dalam perkembangannya, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2003 berkembang menjadi 6 (enam) kabupaten dan 2 (dua) kota. Seiring dengan euforia pemekaran wilayah maka pada tahun 2007, wilayah administrasi telah menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 2 (dua) kota, 177 kecamatan dan 1.911 desa/kelurahan. Tahun 2014 berkembang menjadi 15 (limabelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, 209 kecamatan dan 2.245 desa/kelurahan sebagaimana ditunjukkan Tabel 15.

Karakteristik demografis Provinsi Sulawesi Tenggara ditandai dengan penyebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang melampaui angka nasional, struktur penduduk yang berbentuk piramidal dan angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang cukup tinggi yang kesemuanya perlu mendapat perhatian yang lebih seksama.

Kabupaten induk seperti Kolaka dan Kota Kendari memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dibanding dengan kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Keadaan jumlah, persebaran dan pertumbuhan penduduk kabupaten kota di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 16. Rerata Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)	Pesebaran (%)	Pertumbuhan (%)*
1	Buton ¹	261.802	10,69	0,73
2	Buton Utara	58.918	2,41	1,72
3	Wakatobi	94.789	3,87	0,29
4	Bombana	159.718	6,52	3,26
5	Muna ²	284.977	11,64	1,30
6	Konawe	229.801	9,39	1,74
7	Konawe Selatan	289.815	11,84	1,59
8	Konawe Utara	57.077	2,33	2,24
9	Kolaka	182.121	7,44	3,13
10	Kolaka Utara	136.883	5,59	2,84
11	Kota Kendari	335.889	13,72	3,51
12	Kota Baubau	151.485	6,19	2,35
13	Kolaka Timur	173.623	7,09	3,04
14	Konawe Kepulauan	31.183	1,27	1,59
Jumlah		2.448.081	100,00	2,14

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

¹ termasuk Buton Tengah dan Buton Selatan

² termasuk Muna Barat

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas mencapai 1.623.264 jiwa atau 66,31% dari jumlah penduduk Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut 95,57% tercatat sebagai penduduk yang bekerja dari total angkatan kerja. Kondisi ini sejalan dengan persentase angka pengangguran pada tahun 2014 yang tercatat 4,43% menurun dari 4,61% pada tahun 2010.

Selanjutnya struktur penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17. Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kelompok Umur

Klp Umur	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-4	242.552	244.142	268.703	273.917	278.800	294.635	294.141
5-9	253.453	255.084	268.270	273.517	278.328	275.139	282.765
10-14	233.619	238.350	245.951	250.678	255.019	250.298	253.417
15-19	215.159	205.161	213.703	217.924	221.939	231.954	236.612
20-24	171.448	168.854	197.824	201.752	205.744	209.904	212.584
25-29	179.343	189.077	197.691	201.668	205.533	197.871	199.996



30-34	146.762	154.406	171.711	175.199	178.558	186.469	189.824
35-39	150.609	157.709	161.454	164.768	167.871	170.395	173.741
40-44	112.629	119.797	131.647	134.309	136.820	149.472	154.449
45-49	101.017	97.172	102.590	104.699	106.626	120.368	126.037
50-54	83.728	86.125	84.250	85.961	87.501	93.864	97.991
54-59	51.905	64.444	58.610	59.818	60.876	71.708	75.483
> 60	132.750	137.979	130.182	132.810	134.965	144.636	150.768
Total	2.074.974	2.118.300	2.232.586	2.277.020	2.318.600	2.396.713	2.448.081

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

Ditinjau dari Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate* atau TFR) sesuai Laporan Pendahuluan SDKI Tahun 2014 dimana TFR adalah jumlah dari angka kelahiran menurut kelompok umur dan merupakan ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas yang berlaku. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata wanita di Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia akan mempunyai 3 anak selama hidupnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian secara nasional yang sebesar 2.6.

2.1.5. Infrastruktur Daerah

Beberapa infrastruktur dasar yang bersifat strategis telah dibangun dalam kurun waktu tahun 2008 – 2014 adalah Pelabuhan Kontainer Bungkutoko, pembangunan jalan provinsi sepanjang 906,09 km dan jalan nasional sepanjang 1.397,05 km serta total pembangunan jembatan sepanjang 596 meter, pembangunan pelabuhan penyeberangan Amolengu – Labuan dan pengoperasian Kapal Ferry Bahteramas Kamaru – Wanci. Selain itu telah direhabilitasi jaringan irigasi, bangunan pengendali banjir dan lain-lain.

Di bidang perhubungan, telah dilakukan perpanjangan *runway* Bandara Haluoleo dari 2.250 meter menjadi 2.500 meter, lebar dari 30 meter menjadi 45 meter. Perluasan *appron* dari 195 meter x 91 meter menjadi 234 meter x 113 meter serta pemasangan garbarata sebanyak 2 unit.

Peningkatan arus penumpang, barang dan jasa melalui Bandar Udara Haluoleo, Bandar Udara Betoambari Baubau, Bandar Udara Sangia Ni Bandera Kolaka dan Bandar Udara Matahora Wakatobi, terus meningkat. Keadaan arus penumpang barang dan jasa yang tiba dan berangkat melalui Bandara Haluoleo Kendari dan Bandar Udara Betoambari Baubau disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18. Keadaan Arus Penumpang dan Barang Tahun 2008-2013

	Arus Penumpang dan Barang	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	195.202. 209	239.589. 837	249.424. 263	250.356. 316	256,123, 423	298,605, 218
2	Arus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (org)	834.036	762.929	794.694	797.294	805,320	934,171
3	Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (org)	21.320.4 10	21.654.5 20	23.996.4 72	25.321.4 30	28,124,5 21	32,624,4 44
4	Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (org)	725.643	751.237	794.694	812.542	852,328	988,700
5	Arus Keberangkatan dengan Transportasi darat	172.322. 120	216.421. 151	223.838. 403	223.425. 050	225,489, 120	261,567, 379
6	Jumlah Barang yang Terangkut melalui	583.152	586.546	622.035	960.669	980,345	1,137,20



	Arus Penumpang dan Barang	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Angkutan Umum						0
7	Jumlah Barang Masuk melalui Penyeberangan Laut (ton)	121.250	124.321	126.210	128.562	131,453	152,485
8	Jumlah Barang Masuk melalui Moda Transportasi Darat (ton)	163.351	143.645	126.210	456.045	615,235	713,672
9	Jumlah Barang Keluar melalui Penyeberangan Laut	101240	105.158	131.230	134.520	139,430	161,738
10	Jumlah Barang Keluar melalui Moda Transportasi Darat	197.311	213.422	238.385	241.542	280,540	325,426
11	Arus Angkutan Udara	7.932.18 4	8.453.04 6	8.021.73 1	8.061.35 5	7,410,12 2	8,151,13 4
12	Arus Kedatangan dengan Transportasi Udara (org)	207.686	272.163	270.497	295.420	405,688	446,256
13	Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (org)	210.661	279.645	237.209	304.017	412,860	454,146
14	Arus Barang Masuk melalui Moda Transportasi Udara (kg)	4.314.13 5	4.279.93 6	3.972.18 1	4.349.44 9	3,778,70 1	4,156,57 1
15	Arus Barang Keluar melalui Moda Transportasi Udara (kg)	3.199.70 2	3.621.30 2	3.541.84 4	3.112.46 9	2,812,87 3	3,094,16 0

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun 2015

Pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pengoperasian Kapal Ferry Bahteramas yang menghubungkan Kamaru (di Pulau Buton) dan Wanci Wakatobi, merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi untuk menghubungkan seluruh wilayah dataran dan kepulauan di Sulawesi Tenggara.

2.1.6. Pola Ruang dan Struktur Ruang

Kebijakan penataan ruang daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :

- menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
- peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
- menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
- pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas :

- menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
- mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;
- mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan



- d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas :

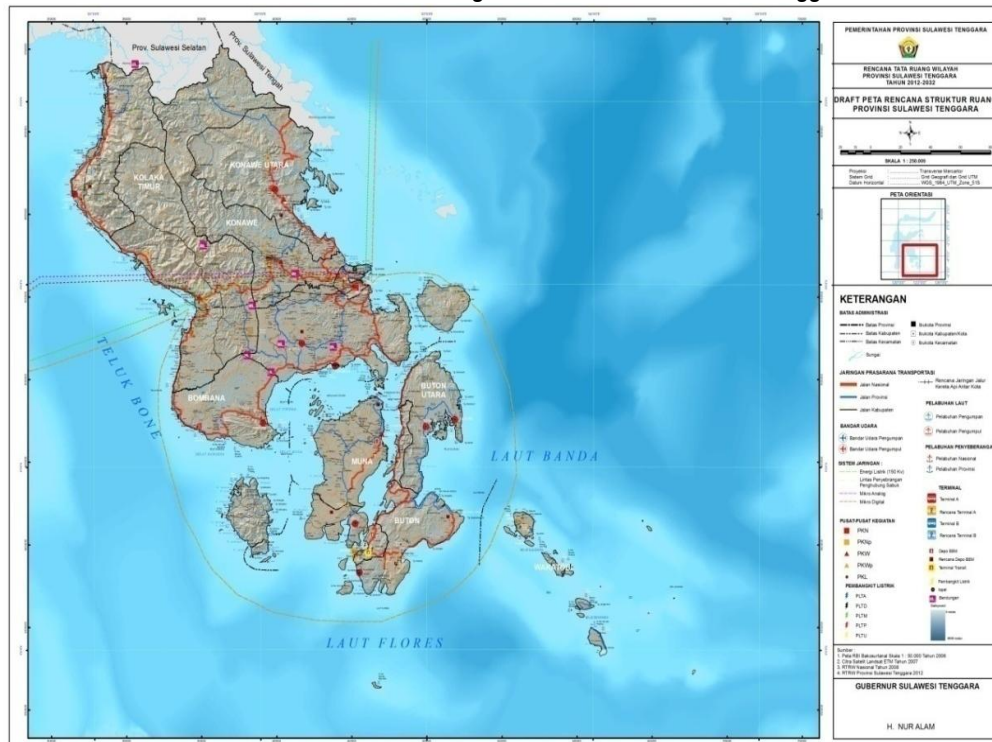
- a. menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
- b. mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
- e. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
- g. pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
- d. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
- e. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

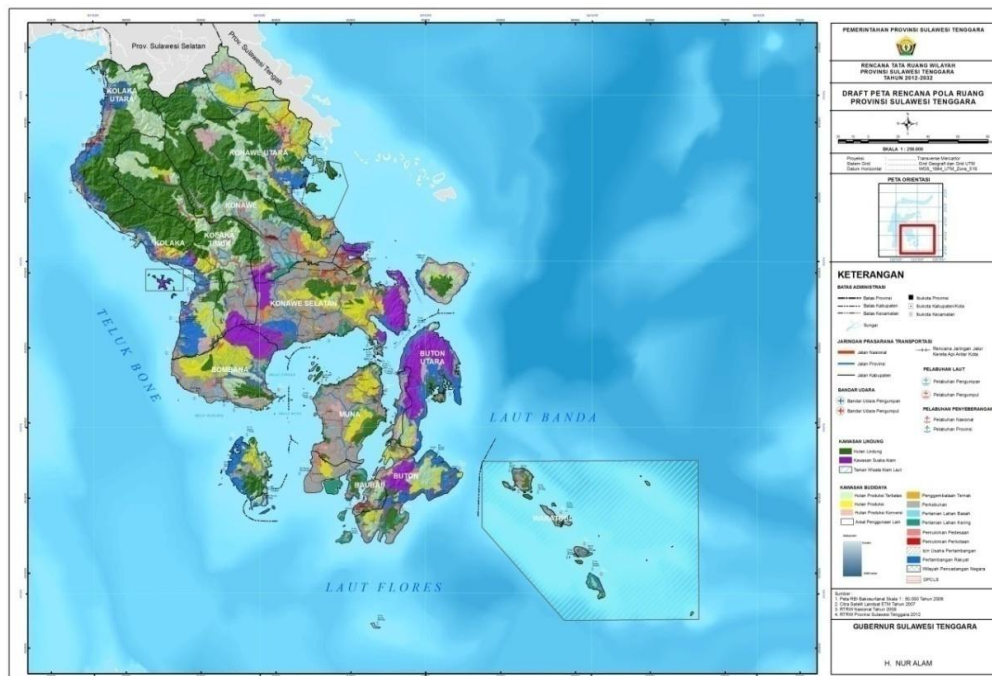


Gambar 2. Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara



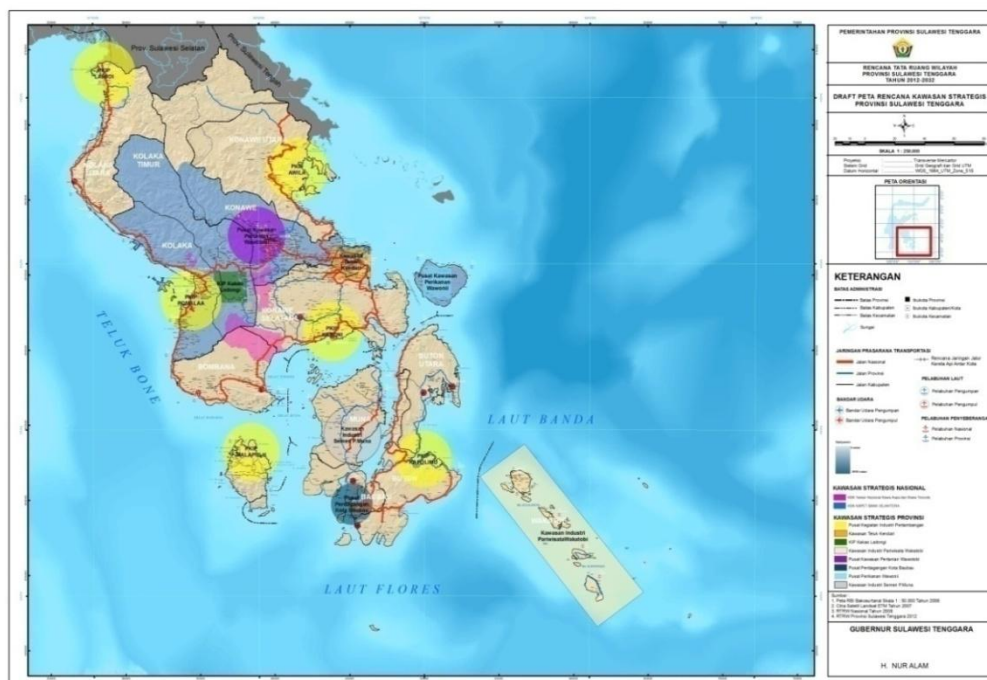
Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2013

Gambar 3. Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2013

Gambar 4. Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2012

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka salah satu aspek yang dilihat adalah aspek pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan pada kontribusi setiap sektor pada komposisi PDRB. Pada tabel berikut ini diperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi setiap sektor pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 19. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	13.741.144,55	28,39	14.007.464,21	26,16	14.625.406,59	24,46	15.508.217,36	24,13	16.921.607,78	24,78
2	Pertambangan & Penggalian	8.296.102,00	17,14	10.690.634,22	19,97	13.833.548,85	23,14	14.866.536,76	23,13	14.148.927,78	20,72
3	Industri pengolahan	3.227.764,13	6,67	3.522.829,91	6,58	3.669.856,82	6,14	3.824.676,91	5,95	4.120.653,04	6,03
4	Pengadaan Listrik & Gas	19.451,36	0,04	21.833,48	0,04	27.241,53	0,05	30.958,17	0,05	34.240,72	0,05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	98.542,00	0,20	103.392,77	0,19	119.052,07	0,20	130.165,84	0,20	139.232,37	0,20



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Sektor	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
6	Konstruksi	5.482.265,15	11,33	6.145.841,91	11,48	6.849.365,64	11,46	7.441.991,91	11,58	8.380.774,94	12,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5.611.064,12	11,59	6.204.053,16	11,59	6.888.012,93	11,52	7.515.269,82	11,69	8.139.100,97	11,92
8	Transportasi & Pergudangan	2.153.385,38	4,45	2.392.550,97	4,47	2.635.367,94	4,41	2.805.301,60	4,36	2.949.137,28	4,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244.853,15	0,51	295.651,80	0,55	330.957,84	0,55	358.542,18	0,56	392.293,18	0,57
10	Informasi dan Komunikasi	1.183.417,61	2,45	1.193.966,85	2,23	1.314.981,83	2,20	1.496.449,83	2,33	1.540.202,45	2,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	877.359,24	1,81	1.029.448,87	1,92	1.184.844,54	1,98	1.352.627,27	2,10	1.480.342,34	2,17
12	Real Estat	923.509,80	1,91	997.027,41	1,86	1.044.642,05	1,75	1.103.427,99	1,72	1.176.666,07	1,72
13	Jasa Perusahaan	89.966,84	0,19	102.212,02	0,19	113.427,93	0,19	128.187,50	0,20	140.671,54	0,21
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.155.119,55	6,52	3.219.439,52	6,01	3.247.714,52	5,43	3.388.607,67	5,27	3.828.331,51	5,61
15	Jasa Pendidikan	2.178.477,26	4,50	2.384.340,01	4,45	2.533.177,05	4,24	2.824.985,14	4,40	3.219.902,00	4,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.846,12	0,98	506.292,32	0,95	544.734,91	0,91	605.007,88	0,94	678.375,94	0,99
17	Jasa Lainnya	642.884,11	1,33	729.710,08	1,36	823.066,02	1,38	892.829,95	1,39	1.008.264,41	1,48
PDRB		48.401.152,38	100,00	53.546.689,52	100,00	59.785.399,06	100,00	64.273.783,78	100,00	68.298.724,30	100,00

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015; *) = Angka Sementara, **) = Angka Sangat Sementara

Tabel 20. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No	Sektor	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	13.741.144,55	28,39	14.631.011,62	26,24	16.305.585,70	25,20	18.095.983,92	25,47	20.158.060,05	25,64
2	Pertambangan & Penggalian	8.296.102,00	17,14	11.102.636,66	19,91	14.865.627,39	22,98	15.582.057,71	21,93	15.832.070,66	20,14
3	Industri pengolahan	3.227.764,13	6,67	3.657.918,90	6,56	3.874.685,94	5,99	4.181.864,04	5,89	4.692.250,20	5,97
4	Pengadaan Listrik & Gas	19.451,36	0,04	20.194,86	0,04	24.456,08	0,04	25.355,00	0,04	27.431,10	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	98.542,00	0,20	104.106,18	0,19	122.135,52	0,19	138.821,87	0,20	163.052,85	0,21
6	Konstruksi	5.482.265,15	11,33	6.396.444,40	11,47	7.401.424,51	11,44	8.329.077,35	11,72	9.690.353,19	12,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5.611.064,12	11,59	6.459.268,93	11,58	7.262.524,25	11,23	8.076.246,80	11,37	9.225.945,13	11,73
8	Transportasi & Pergudangan	2.153.385,38	4,45	2.429.048,02	4,36	2.813.820,12	4,35	3.160.530,12	4,45	3.433.715,89	4,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244.853,15	0,51	305.867,53	0,55	364.024,29	0,56	404.096,43	0,57	454.959,19	0,58
10	Informasi dan Komunikasi	1.183.417,61	2,45	1.179.337,21	2,12	1.286.578,22	1,99	1.451.309,48	2,04	1.478.510,56	1,88
11	Jasa Keuangan	877.359,24	1,81	1.076.342,	1,93	1.343.962,	2,08	1.601.078,	2,25	1.829.106,	2,33



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No	Sektor	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	dan Asuransi			32		42		14		63	
12	Real Estat	923.509,80	1,91	1.024.445,66	1,84	1.116.048,23	1,73	1.194.101,81	1,68	1.293.200,08	1,64
13	Jasa Perusahaan	89.966,84	0,19	104.961,53	0,19	119.711,83	0,19	136.981,16	0,19	154.808,82	0,20
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.155.119,55	6,52	3.513.916,66	6,30	3.669.747,34	5,67	4.035.943,63	5,68	4.748.428,74	6,04
15	Jasa Pendidikan	2.178.477,26	4,50	2.482.593,77	4,45	2.681.164,20	4,14	3.020.320,62	4,25	3.585.496,40	4,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.846,12	0,98	532.872,67	0,96	589.730,01	0,91	662.907,14	0,93	760.782,18	0,97
17	Jasa Lainnya	642.884,11	1,33	737.587,98	1,32	852.758,51	1,32	944.613,63	1,33	1.092.217,49	1,39
PDRB		48.401.152,38	100,00	55.758.554,87	100,00	64.693.984,56	100,00	71.041.288,85	100,00	78.620.389,17	100,00

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015; *) = Angka Sementara, **) = Angka Sangat Sementara

Tabel 21. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

No	Sektor	2010		2011		2012		2013*		2014**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	100,00	100,00	106,48	106,48	118,66	118,66	131,69	131,69	146,70	146,70
2	Pertambangan & Penggalian	100,00	100,00	133,83	133,83	179,19	179,19	187,82	187,82	190,84	190,84
3	Industri pengolahan	100,00	100,00	113,33	113,33	120,04	120,04	129,56	129,56	145,37	145,37
4	Pengadaan Listrik & Gas	100,00	100,00	103,82	103,82	125,73	125,73	130,35	130,35	141,02	141,02
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	100,00	100,00	105,65	105,65	123,94	123,94	140,88	140,88	165,47	165,47
6	Konstruksi	100,00	100,00	116,68	116,68	135,01	135,01	151,93	151,93	176,76	176,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	100,00	115,12	115,12	129,43	129,43	143,93	143,93	164,42	164,42
8	Transportasi & Pergudangan	100,00	100,00	112,80	112,80	130,67	130,67	146,77	146,77	159,46	159,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	100,00	124,92	124,92	148,67	148,67	165,04	165,04	185,81	185,81
10	Informasi dan Komunikasi	100,00	100,00	99,66	99,66	108,72	108,72	122,64	122,64	124,94	124,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	100,00	122,68	122,68	153,18	153,18	182,49	182,49	208,48	208,48
12	Real Estat	100,00	100,00	110,93	110,93	120,85	120,85	129,30	129,30	140,03	140,03
13	Jasa Perusahaan	100,00	100,00	116,67	116,67	133,06	133,06	152,26	152,26	172,07	172,07
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	100,00	111,37	111,37	116,31	116,31	127,92	127,92	150,50	150,50
15	Jasa Pendidikan	100,00	100,00	113,96	113,96	123,08	123,08	138,64	138,64	164,59	164,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	100,00	111,98	111,98	123,93	123,93	139,31	139,31	159,88	159,88
17	Jasa Lainnya	100,00	100,00	114,73	114,73	132,65	132,65	146,93	146,93	169,89	169,89
PDRB		100,00	100,00	115,20	115,20	133,66	133,66	146,78	146,78	162,43	162,43

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015; *) = Angka Sementara, **) = Angka Sangat Sementara



**Tabel 22. Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)**

No	Sektor	Pertumbuhan (%)							
		2011		2012		2013*		2014**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	6,48	1,94	11,45	4,41	10,98	6,04	11,40	9,11
2	Pertambangan & Pengalihan	33,83	28,86	33,89	29,40	4,82	7,47	1,60	(4,83)
3	Industri pengolahan	13,33	9,14	5,93	4,17	7,93	4,22	12,20	7,74
4	Pengadaan Listrik & Gas	3,82	12,25	21,10	24,77	3,68	13,64	8,19	10,60
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,65	4,92	17,32	15,15	13,66	9,34	17,45	6,97
6	Konstruksi	16,68	12,10	15,71	11,45	12,53	8,65	16,34	12,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	15,12	10,57	12,44	11,02	11,20	9,11	14,24	8,30
8	Transportasi & Pergudangan	12,80	11,11	15,84	10,15	12,32	6,45	8,64	5,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,92	20,75	19,01	11,94	11,01	8,33	12,59	9,41
10	Informasi dan Komunikasi	(0,34)	0,89	9,09	10,14	12,80	13,80	1,87	2,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,68	17,33	24,86	15,10	19,13	14,16	14,24	9,44
12	Real Estat	10,93	7,96	8,94	4,78	6,99	5,63	8,30	6,64
13	Jasa Perusahaan	16,67	13,61	14,05	10,97	14,43	13,01	13,01	9,74
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,37	2,04	4,43	0,88	9,98	4,34	17,65	12,98
15	Jasa Pendidikan	13,96	9,45	8,00	6,24	12,65	11,52	18,71	13,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,98	6,40	10,67	7,59	12,41	11,06	14,76	12,13
17	Jasa Lainnya	14,73	13,51	15,61	12,79	10,77	8,48	15,63	12,93
PDRB		15,20	10,63	16,03	11,65	9,81	7,51	10,67	6,26

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015; *) = Angka Sementara, **) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 23. Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) (Milyar Rupiah)**

No	Kabupaten	2010		2011		2012		2013		2014	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1.	Buton	3.640,08	3.640,08	4.253,79	4.075,05	4.888,38	4.512,65	5.434,81	4.877,74	2.559,67	2.209,43
2	Muna	3.783,70	3.783,70	4.261,94	4.091,09	4.767,70	4.412,37	5.254,91	4.706,94	4.439,85	3.829,61
3	Konawe	4.004,28	4.004,28	4.523,48	4.339,14	5.146,96	4.757,52	4.894,67	4.383,57	5.509,48	4.732,81
4	Kolaka	11.045,53	11.045,53	13.170,91	12.644,47	15.925,84	14.722,38	14.581,03	13.521,68	15.292,37	13.587,20
5	Konawe Selatan	4.462,86	4.462,86	5.055,08	4.859,95	5.838,61	5.346,78	6.542,62	5.718,37	7.307,02	6.122,16
6	Bombana	2.453,02	2.453,02	2.793,53	2.669,00	3.238,01	2.967,46	3.568,58	3.215,13	3.985,95	3.451,47
7	Wakatobi	1.553,30	1.553,30	1.798,39	1.716,52	2.053,59	1.889,70	2.295,53	2.037,26	2.575,41	2.197,12
8	Kolaka Utara	3.172,45	3.172,45	3.621,78	3.477,62	4.212,16	3.889,67	4.691,60	4.228,09	5.280,59	4.581,13
9	Buton Utara	1.194,95	1.194,95	1.359,39	1.308,89	1.540,97	1.423,85	1.734,21	1.549,53	1.978,75	1.696,89
10	Konawe Utara	1.610,76	1.610,76	1.824,27	1.756,43	2.070,39	1.907,06	2.262,46	2.040,84	2.435,08	2.105,15
11	Kolaka Timur	-	-	-	-	-	-	2.511,76	2.256,16	2.848,51	2.455,74
12	Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-	-	762,34	681,5	851,39	733,31
13	Muna Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1.538,50	1.316,54
14	Buton Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,53	1.260,52
15	Buton Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,62	1.587,68
16	Kota Kendari	8.194,91	8.194,90	9.367,68	9.036,25	0.603,75	9.926,25	11.787,01	10.787,97	13.355,00	11.796,87
17	Kota Baubau	3.285,31	3.285,32	3.735,19	3.598,20	4.234,72	3.951,83	4.721,04	4.267,67	5.324,25	4.635,88
Sulawesi Tenggara		48.401,14	48.401,15	55.758,53	53.546,69	64.693,98	59.785,40	71.041,29	64.273,77	78.620,39	68.298,72

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015



2.2.1.2. Laju Inflasi

Data laju inflasi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2008-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 24. Laju Inflasi Tahun 2008 - 2014 Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inflasi (%)	15,28	4,60	3,87	5,09	5,25	5,92	7,4

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rerata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Rerata angka melek huruf di Sulawesi Tenggara telah mencapai di atas 90%, untuk penduduk yang berusia 15 tahun. Sedang untuk penduduk berusia di atas 15 tahun masih berkisar 45%.

**Tabel 25. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 - 2014
Provinsi Sulawesi Tenggara**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Melek Huruf (%)	91,29	91,51	91,85	91,29	91,49	92,61	94,03

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015

2.2.2.2. Angka Rerata Lama Sekolah

Rerata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2010 berkisar 8 tahun, pada tabel dibawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

**Tabel 26. Rerata Lama Sekolah
di Provinsi Sulawesi Tenggara**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Rerata Lama Sekolah	8,10	8,20	8,30	8,41	8,68

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, diperlihatkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 27. Capaian APK Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
APK SD/MI (%)	100,98	101,32	117	118,42	117,81	118,94	121,45
APK SMP/MTs(%)	92,84	95,07	97,21	97,58	100,57	101,45	107,86
APK SM/MA(%)	56,22	58,59	76,96	77,34	93,28	94,09	86,47

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Sultra Tahun 2015

2.2.2.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pada tabel di bawah ini digambarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 28. Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Mencari Pekerjaan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak / Belum tamat SD	1.185	432	1.617
Sekolah Dasar	3.432	1.478	4.910
SLTP	2.961	1.860	4.821
SMTA Umum	13.529	9.821	23.350
SMTA Kejuruan	1.849	1.161	3.010
Diploma / Universitas	4.293	6.089	10.382
Jumlah	27.249	20.841	48.090

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Indikator penting keberhasilan pendidikan ditunjukkan oleh semakin membaiknya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APM dan APK mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah kebijakan pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, meliputi Sekolah Negeri, Swasta dan Keagamaan.

Tabel 29. Capaian APM Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
APM SD/MI (%)	93,07	93,81	95,44	95,92	96,19	98,71	91,52
APM SMP/MTs	69,40	71,13	73,35	74,32	79,70	80,94	82,36
APM SM/MA	44,26	47,66	63,93	65,15	71,66	72,78	66,47

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Tahun 2015

Peningkatan APK dan APM ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan. Selama Tahun 2008 hingga Tahun 2014 telah terbangun 3.581 unit gedung sekolah mulai dari SD hingga SMA dan sederajat.

Tabel 30. Pembangunan Gedung Sekolah SD, SMP, SMA dan Sederajat di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SD dan sederajat	2.146	2.277	2.315	2.364	-	-	-
SMP dan Sederajat	534	722	759	821	-	-	-
SMA dan Sederajat	282	359	372	396	-	-	-
Jumlah	2.962	3.358	3.446	3.581	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Tahun 2015



Tabel 31. Jumlah Alumni Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2007/2008	6,409	7,293	13,702
2008/2009	3,270	3,782	7.052
2009/2010	3,116	4,217	7,333
2010/2011	5,916	7,674	13,590

Sumber : Sultra dalam Angka, Tahun 2012

2.2.2.6. Angka Kelulusan

Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan adalah angka kelulusan. Perkembangan angka kelulusan meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pendidikan juga meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014 sebagai berikut :

Tabel 32. Perkembangan Angka Kelulusan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014

TAHUN	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	SMK (%)
2008	100	92,03	93,66	76,09
2009	100	97,23	96,89	89,16
2010	100	97,76	99,38	98,99
2011	100	98,96	98,62	98,09
2012	100	99,42	99,53	97,98
2013	-	99,84	98,11	99,21
2014	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Tahun 2015

2.2.2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup dari 69,29 tahun pada tahun 2007 , 70,01 tahun pada tahun 2011 menjadi 70,71 tahun pada tahun 2014 , menurunnya kasus kematian ibu dari 92 kasus pada tahun 2007 , 69 kasus pada tahun 2011 menjadi 65 kasus pada tahun 2014, menurunnya kasus kematian bayi + neonatal dari 518 kasus pada tahun 2007 , 429 kasus pada tahun 2011 menjadi 172 kasus pada tahun 2014 dan menurunnya kasus gizi buruk dari 2.662 kasus pada tahun 2007 , 508 kasus pada tahun 2011 menjadi 250 kasus pada tahun 2014. Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 33. Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (thn)	69,29	69,46	69,63	69,80	70,01	70,22	70,43	70,71
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	959	960,2	961,4	962,6	963,8	995,40	995,55	996,38
Jumlah Kasus Kematian Ibu	92	80	55	74	66	84	79	65
Jumlah Kasus Kematian Bayi	518	422	518	587	429	209	211	172
Jumlah kematian balita	151	141	212	250	126	298	308	270
Jumlah Kasus Gizi Buruk	2662	1137	1246	938	508	385	333	250

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015



Umur harapan hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada penurunan kematian bayi, oleh karena itu umur harapan hidup sangat peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin kenaikan angka harapan hidup pada waktu lahir dan penurunan AKB. Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup diproyeksikan meningkat dari 69,29 tahun 2007 menjadi 70,71 tahun 2014.

Angka kelangsungan hidup bayi memberikan gambaran kemampuan seorang anak dalam periode usia di bawah 12 bulan. Angka kelangsungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2007 dan laporan kematian bayi menunjukkan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan yakni dari 959 per 1000 KH menjadi 965 per 1000 KH.

Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan menunjukkan penurunan drastis yakni dari 2.662 kasus tahun 2007 turun menjadi 250 kasus tahun 2014. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa diantaranya dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas perawatan.

Jumlah kasus kematian ibu dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan yakni dari 92 kasus tahun 2007 menjadi 65 kasus tahun 2014. Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukan penurunan pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2010. Kasus kematian bayi turun dari 518 kasus menjadi 429 kasus. Begitupula kasus kematian anak balita turun dari 151 kasus menjadi 126 kasus. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan anak diantaranya peningkatan kapasitas tenaga, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, penanganan komplikasi neonatal, deteksi dini tumbuh kembang bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen.

2.2.2.8. *Angka Usia Harapan Hidup*

Derajat kesehatan merupakan indikator utama pembangunan sumberdaya manusia. Selama kurun waktu lima tahun 2007 - 2014, pelayanan kesehatan adalah merupakan salah satu kegiatan unggulan yang termasuk dalam program pokok BAHTERAMAS. Pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di puskesmas sampai dengan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut dengan fasilitas kelas III di RSUD kabupaten/kota, dengan rujukan tertinggi di RSUD provinsi. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup dari 67,2 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,71 tahun pada tahun 2014, menurunnya kasus kematian ibu dari 92 kasus pada tahun 2007 menjadi 65 kasus pada tahun 2014, menurunnya kasus kematian bayi + neonatal dari 518 kasus pada tahun 2007 menjadi 172 kasus pada tahun 2014, dan menurunnya kasus gizi buruk dari 2.662 kasus pada tahun 2007 menjadi 250 kasus pada tahun 2014.

2.2.2.9. *Rasio Penduduk Yang Bekerja.*

Rasio penduduk yang bekerja, menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terhadap akses pekerjaan, pada tabel berikut ini digambarkan Rasio Penduduk yang bekerja pada tahun 2014.



Tabel 34. Rasio Penduduk Bekerja di Provinsi Sulawesi Tenggara

Uraian	2014	
	L	P
Rasio Penduduk yang bekerja	95,89%	95,07%
Total	95,57%	

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai ukuran kualitas hidup manusia, yang menunjukkan tiga dimensi dasar kualitas hidup manusia yaitu Kesehatan di lihat melalui hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, serta kesejahteraan, kemampuan ekonomi, yang di lihat dari standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terjadi perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. IPM dan IPG Sulawesi Tenggara Pada tahun 2008, IPM mencapai 69,00 kemudian meningkat menjadi 71,73 pada tahun 2013 dan IPG juga mengalami peningkatan dari 62,48 pada tahun 2008 menjadi 66,90 pada tahun 2013.

Tabel 35. IPM dan IPG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013

N O	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM						IPG					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	SULAWESI TENGGARA	69,00	69,52	70,00	70,55	71,05	71,73	62,48	62,89	63,87	64,79	65,72	66,90
1	Buton	67,82	68,24	68,8	69,34	69,95	70,35	58,63	58,94	59,97	61,04	61,89	62,63
2	Muna	66,49	67,03	67,45	67,95	68,35	68,97	60,01	60,69	61,51	61,94	62,85	63,62
3	Konawe	68,72	69,27	69,77	70,42	70,95	71,67	65,11	65,14	65,23	65,91	66,58	67,57
4	Kolaka	70,06	70,41	70,83	71,46	72,00	72,39	55,82	56,15	57,33	57,92	58,71	59,53
5	Konawe Selatan	68,86	69,24	69,42	69,80	70,24	70,70	60,37	60,63	61,39	61,85	62,60	63,23
6	Bombana	66,05	66,63	67,2	67,85	68,51	69,67	55,56	55,84	56,07	56,64	57,26	58,56
7	Wakatobi	66,03	66,70	67,2	68,04	68,78	69,77	60,31	61,9	62,19	63,98	64,56	65,47
8	Kolaka Utara	67,91	68,50	68,93	69,33	69,87	70,65	57,27	57,89	58,30	58,37	60,10	60,86
9	Konawe Utara	67,16	67,62	68,07	68,86	69,84	70,66	62,75	63,4	65,44	65,94	66,94	67,95
10	Buton Utara	67,49	67,97	68,38	69,24	69,31	70,13	65,3	65,5	65,55	66,48	66,60	68,46
11	Kota Kendari	75,09	75,31	75,66	76,07	76,51	77,02	70,28	70,38	70,51	71,15	71,75	72,70
12	Kota Baubau	72,14	72,87	73,48	74,1	74,58	75,10	62,3	62,9	63,59	64,56	65,30	66,01

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015, (angka 2014 sementara dihitung)

pada Tabel 35 terlihat bahwa terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi tenggara. Ini memberikan gambaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan serta kualitas ekonomi bagi seluruh masyarakat dan juga memperlihatkan bahwa hasil-hasil pembangunan itu telah memberikan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tenggara.

2.2.2.10. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mencakup pada program bidang pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan komunitas



adat terpencil dan pemberdayaan peran keluarga. Indikator keberhasilan penanganannya adalah jumlah PMKS yang terbantu dan diberdayakan serta memperoleh bantuan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui KUBE Pedesaan dan KUBE Perkotaan.

Tabel 36. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Kab/Kota	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Kemiskinan		Rumah Tidak Layak Huni	KBSP	Kat	
			Penduduk Miskin	KFM			Lokasi	KK
	Sulawesi Tenggara	9.088	400.700	100.175	96.238	840	98	8.652
1	Buton	909				95	10	730
2	Muna	30				85	16	1.590
3	Konawe	817				80	4	415
4	Kolaka	843				80	14	1.388
5	Konawe Selatan	861				75	17	1.419
6	Bombana	1.556				65	10	704
7	Wakatobi	1.185				50	6	603
8	Kolaka Utara	160				75	3	262
9	Buton Utara	284				-	-	-
10	Konawe Utara	290				75	18	1.541
11	Kendari	1.038				95	-	-
12	Baubau	1.115				65	-	-

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2012. (Tidak ada perubahan data tahun 2015)

2.2.2.11. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Untuk program pelayanan dan rehabilitasi sosial mencakup penanganan keterlantaran dan ketunasusilaan orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar. Pelayanan dan rehabilitasi sosial mengupayakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan melakukan rehabilitasi dan penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan rehabilitasi dan pemberian bantuan bagi kelompok-kelompok usaha ekonomis produktif sehingga dengan segala keterbatasan yang ada dapat menjadi manusia mandiri dan tidak lagi tergantung dengan masyarakat lain. Pelayanan rehabilitasi ini dilakukan melalui pembinaan di luar panti dan di dalam panti yaitu UPT Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja.

Tabel 37. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No	Kab/Kota	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak Nakal	Anak Jalanan	Lansia Terlantar	Penyandang Cacat	Tuna Sosial	Pengemis	Gelandangan	Eks Napi	Korban Napza
	Sulawesi Tenggara	15,328	43,795	6,961	2,254	28,385		622	160	4,746	320	36,735
1	Buton			969	-			-	-	794	-	
2	Muna			500	200			-	-	153	-	
3	Konawe			3.091	834			57	-	2,396	320	
4	Kolaka			118	26			52	8	9	-	
5	Konawe Selatan			4	-			10	111	87	-	
6	Bombana			273	-			-	-	-	-	
7	Wakatobi			77	62			86	25	81	-	



8	Kolaka Utara			28	-			-	-	-	-	
9	Buton Utara			302	-			-	-	248	-	
10	Konawe Utara			1.096	295			109	-	849	-	
11	Kendari			268	687			249	13	102	-	
12	Baubau			235	150			59	3	27	-	

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2012. (Tidak ada perubahan data tahun 2015)

2.2.2.12. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, I Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk program perlindungan dan jaminan sosial mencakup penanganan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan uang dan barang serta program keluarga harapan. Perlindungan dan jaminan sosial adalah upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi para korban bencana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pemberian jaminan sosial berupa asuransi kesejahteraan sosial bagi keluarga sasaran.

Tabel 38. Jumlah Penyandang Masalah Kesos Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Kab/Kota	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Pekerja Migran Terlantar	Keluarga Rentan
	Sulawesi Tenggara	556	12,184	514	13,543
1	Buton		1,424	100	107
2	Muna		4,101	100	5,689
3	Konawe		-	62	560
4	Kolaka		-	60	5,528
5	Konawe Selatan		94	67	-
6	Bombana		2,248	-	-
7	Wakatobi		2,940	-	-
8	Kolaka Utara		933	-	450
9	Buton Utara		444	41	33
10	Konawe Utara		-	41	984
11	Kendari		-	34	-
12	Baubau		-	9	192

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2012. (Tidak ada perubahan data tahun 2015)

2.2.2.13. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Guna mendukung pencapaian program pembangunan kesejahteraan sosial, maka peran potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai partisipan pembangunan kesos yang berbasis masyarakat, maka pemberdayaan PSKS sangat penting guna mempercepat laju pembangunan kesejahteraan sosial.

Tabel 39. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota Tahun 2012

No	Kab/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat	ORSOS	Karang Taruna	KKDU	WKSBM	TAGANA
	Sulawesi Tenggara	833	118	827	58	48	-
1	Buton	164	8	137	-	-	80
2	Muna	162	22	148	58	6	10
3	Konawe	54	13	60	-	7	21
4	Kolaka	59	20	179	-	4	50
5	Konawe Selatan	62	8	111	-	2	16
6	Bombana	46	1	8	-	-	-
7	Wakatobi	12	2	11	-	-	10



No	Kab/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat	ORSOS	Karang Taruna	KKDU	WKSBM	TAGANA
8	Kolaka Utara	21	3	49	-	-	18
9	Buton Utara	6	-	-	-	-	5
10	Konawe Utara	30	3	6	-	-	19
11	Kendari	120	32	78	-	7	317
12	Baubau	97	6	40	-	-	38

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sultra, Tahun 2012. (Tidak ada perubahan data tahun 2015)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

Bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

2.3.1.1. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 40. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2008 s.d 2014**

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
APS Penduduk Usia 7 – 12 Th	97,64	97,69	97,81	97,36	97,41	98,02	99,11
APS Penduduk Usia 13 – 15 Th	85,62	87,20	88,17	86,88	87,85	89,05	93,53
APS Penduduk Usia 16 – 18 Th	59,17	59,19	59,93	62,66	65,26	65,81	72,25

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

b. Rasio guru/murid

Pada tabel berikut ini diperlihatkan rasio antara guru dan murid dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA/ sederajat sejak tahun 2008 hingga tahun 2014.



**Tabel 41. Jumlah Guru dan Murid
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI							
1.1.	Jumlah Guru	24.743	25.175	26.089	26.818	26.653	30.232	21.902
1.2.	Jumlah Murid	335.526	336.737	345.678	348.734	350.672	353.587	356.847
1.3.	Rasio	13,56	13,38	13,25	13,00	13,16	11,70	16,29
2	SMP/MTs							
2.1.	Jumlah Guru	9.117	9.904	10.133	11.062	12.025	11.475	9.920
2.2.	Jumlah Murid	116.992	112.549	114.724	118.408	119.255	119.937	121.125
2.3.	Rasio	12,83	11,36	11,32	10,70	9,92	10,45	12,21
3	SMA/SMK/MA							
3.1.	Jumlah Guru	7.363	8.015	8.498	8.467	9.832	9.815	9.213
3.2.	Jumlah Murid	82.433	83.532	87.045	92.594	98.567	96.249	103.897
3.3.	Rasio	11,20	10,42	10,24	10,94	10,03	9,81	11,28

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

**Tabel 42. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan TK, SD dan SLTP Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	TK			SD			SLTP		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)
1.	Buton	693	2.523	3,64	2.390	49.588	20,75	1.306	16.852	12,90
2	Muna	671	4.379	6,53	3.002	45.113	15,03	1.365	17.710	12,97
3	Konawe	729	4.648	6,38	2.429	34.400	14,16	951	11.434	12,02
4	Kolaka	765	1.306	1,71	2.235	37.129	16,61	677	9.115	13,46
5	Konawe Selatan	434	4.043	9,32	2.457	40.170	16,35	964	13.766	14,28
6	Bombana	462	2.237	4,84	1.395	20.891	14,98	644	6.286	9,76
7	Wakatobi	359	2.360	6,57	1.068	14.350	13,44	556	5.611	10,09
8	Kolaka Utara	416	344	0,83	1.004	16.668	16,00	429	4.802	11,19
9	Buton Utara	190	780	4,11	591	9.819	16,61	323	3.676	11,38
10	Konawe Utara	73	442	6,05	684	9.665	14,13	342	3.392	9,92
11	Kota Kendari	579	3.132	5,41	2.057	37.770	18,36	1.158	13.685	11,82
12	Kota Baubau	437	1.377	3,15	1.055	20.056	19,01	698	7.894	11,31
13	Kolaka Timur	-	-	-	1.173	15.665	13,35	395	5.160	13,06
14	Konawe Kepulauan	-	-	-	362	5.563	15,37	112	1.742	15,55
	Jumlah	5.808	27.571	4,75	21.902	356.847	16,29	9.920	121.125	12,21

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

c. Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik intelektual, emosional, spiritual, fisik maupun kualitas teknisnya yang berorientasi pada pengembangan produktivitas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga



negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah Program Bahteramas bidang pendidikan yang dikenal dengan ” Biaya Operasional Pendidikan” (BOP) pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Dasar dan Menengah yaitu pemberian Biaya Operasional kepada satuan pendidikan dengan tujuan untuk membebaskan dan/atau meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan menengah (usia 7 – 18 tahun) serta usia prasekolah mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan (SNP). Sasaran BOP adalah seluruh satuan pendidikan negeri/swasta baik yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama se provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 43. Perkembangan Anggaran BOP Tahun 2008 - 2014

TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2008	45.000.000.000	36.746.609.000	81,66
2009	91.516.999.068	91.223.584.467	99,68
2010	85.358.090.390	85.254.390.390	99,77
2011	92.424.041.360	83.757.804.500	91,53
2012	80.541.171.000	79.557.276.000	98,78
2013	43.660.586.500	43.197.090.500	98,94
2014	36.347.032.000	35.957.711.500	98,93
TOTAL	474.847.920.318	455.694.466.357	95,61

Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Sultra, Tahun 2015

Tabel 44. Program Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2008 - 2013

No	Pemda	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Skhl	Siswa	Skhl	Siswa	Skhl	Siswa	Skhl	Siswa	Skhl	Siswa	Skhl	Siswa
1	Kab. Bombana	22	4,228	23	4,154	25	4,727	25	4,772	28	5.452	25	5.371
2	Kab. Buton	43	8,950	47	9,703	47	10,384	50	11,300	58	12.606	59	8.476
3	Kab. Buton Utara	10	2,353	14	2,608	14	2,551	14	2,624	17	4.038	21	3.089
4	Kab. Kolaka	48	10,989	48	10,908	49	12,819	51	12,937	54	13.898	55	13.792
5	Kab. Kolaka Utara	13	3,925	15	4,007	16	4,318	17	4,341	17	4.708	18	4.564
6	Kab. Konawe	46	9,610	43	9,096	48	10,763	46	10,591	50	11.543	37	9.431
7	Kab. Konawe Selatan	41	7,350	44	7,894	49	9,901	48	9,581	53	10.024	47	9.987
8	Kab. Konawe Utara	7	1,565	8	1,692	8	1,869	12	2,296	13	2.402	17	2.476
9	Kab. Muna	50	13.004	49	13,310	52	13,432	54	13,509	60	14.137	54	14.429
10	Kab. Wakatobi	16	4,328	18	4,699	20	5,214	20	5,214	23	5.461	19	4.246
11	Kota Baubau	23	9,129	22	8,804	23	9,768	23	9,644	25	9.800	22	9.447
12	Kota Kendari	40	15,256	41	15,042	45	16,299	46	16,265	48	17.293	46	16.976
13	Kab. Kolaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14	Kab. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0



	Konawe Kepulauan												
	Jumlah	359	90,687	372	91,917	396	102,045	406	103.074	446	111.362	420	102.284

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Tahun 2015

Dalam Tahun 2010 hingga 2013 melalui BOP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan insentif kepada guru sebesar Rp.1.500.000 per bulan dan hingga tahun 2013 alokasi dana untuk insentif guru mencapai Rp. **128.464.500.000** dengan sasaran **85.643 guru**, khusus Guru TK/Sederajat mendapatkan Rp. 855.000.000 pada tahun 2013.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendapat Penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (**MURI**) pada Desember 2011 Nomor : 5286/R.MURI/XII/2011 atas Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif Terbanyak Kepada Guru (SD, SMP, SMA) melalui Pemberian BOP Insentif Guru tahun 2008 – 2011 dengan total guru sebanyak **141.377** orang guru sederajat SD/SMP/SMA dengan anggaran sebanyak **Rp.173.475.900.000**. Sampai dengan tahun 2012 jumlah insentif guru sebesar **Rp.183.921.750.000**.

Tabel 45. Jumlah Dana BOP Komponen Insentif Guru Tahun 2008 – 2013

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Guru SD/ sederajat	12.064,800.000	28.024,650.000	31,612,650.000	29,740,500.000	7.481.100.000	2.109.000.000
2	Guru SMP /sederajat	5,839,200.000	14,278.050.000	11,135,850.000	10,939,500.000	2.336.400.000	7.006.500.000
3	Guru SMA /sederajat	4,611,600.000	9,973,650.000	8,182,200.000	7.080.000.000	621.600.000	1.032.000.000
	Jumlah	22,515,600.000	52,276,350.000	50,930,700.000	47,760.000.000	10.439.100.000	10.439.100.000

Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Sultra, Tahun 2015

Dalam tahun 2008 – 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Program Biaya Operasional Pendidikan telah mengadakan Alat Laboratorium IPA dan Buku teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Referensi, Buku Pengayaan dan Buku Evaluasi kepada jenjang SMA/MA/SMK/ sederajat. Jumlah buku yang telah diadakan sebanyak **1.551.177 eksamplar** dan anggaran sebanyak **Rp. 37.242.123.177** sedangkan jumlah sekolah yang mendapat bantuan Alat Laboratorium IPA sebanyak 172 SMA/SMK dengan anggaran sebesar **Rp. 17.095.170.000**

Tabel 46. Jumlah Buku dan Peralatan Laboratorium IPA jenjang Pendidikan Menengah Dana BOP Tahun 2009 - 2012

JENIS	2009		2010		2011		2012		TOTAL	
	JUMLAH	DANA	JUMLAH	DANA	JUMLAH	DANA	JUMLAH	DANA	JENIS	DANA
BUKU	540,730	11,749,962,117	250.000	8,844,444.000	266,667	5,692,757.000	493,780	10,954,960.000	1.551.177	37,242,123,117
ALAT LAB. IPA	-	-	61	5,969,557.000	97	9,670,413.000	14	1,455,200.000	172	17.095,170.000

Sumber : Dinas Pendidikan Prov.Sultra, Tahun 2013

Keberhasilan Program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) khususnya pada jenjang pendidikan menengah, dapat dilihat dari makin meningkatnya capaian angka partisipasi jenjang pendidikan dari tahun-ketahun yang meningkat sangat spektakuler yakni di



tahun 2010 APK SMA/ sederajat sebesar 56,22 % di tahun 2012 telah mencapai 93,28% melebihi target APK nasional 69,6% di tahun 2014/2015. Dengan kesuksesan tersebut, maka sejak tahun 2011 pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perluasan program pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa/siswi jenjang pendidikan menengah yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada Strata 1 dan Strata 2. Program ini dikemas dengan nama Program Cerdas Sulawesi Tenggaraku (*Cerdas Sultraku*). Hingga akhir tahun 2012 telah mencapai 1.118 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3. 803.103.195.

Salah satu hal unik lainnya dalam pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara adalah Program Siswa Sahabat Gubernur bagi siswa/siswi SMA/SMK yang berprestasi di masing-masing kabupaten/kota, yang tujuannya adalah membangun daya juang, memberikan penghargaan dan motivasi kepada generasi muda berprestasi agar selalu bersemangat dan bercita-cita tinggi walaupun dalam keadaan terbatas baik ekonomi maupun akses menuju generasi muda yang berkarakter kuat.

2.3.1.2. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kesehatan

a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu Tahun 2007 hingga Tahun 2014 meningkat pesat, terutama yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti Puskesmas Keliling mencapai 133 unit (184,7%) dari 72 Unit tahun 2007 menjadi 205 unit tahun 2011 dan pada tahun 2014 terhitung 198, Polindes/Poskesdes 450 unit dari 536 Unit tahun 2007 menjadi 986 Unit Tahun 2011 (84.0%), pada tahun 2014 menjadi 892 dan Posyandu 628 unit dari 2241 unit tahun 2007 menjadi 2.869 unit tahun 2011, pada tahun 2014 menjadi 3.066. Pembangunan sarana kesehatan tersebut signifikan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti dikemukakan terdahulu. Secara rinci pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 47. Pembangunan Fasilitas Kesehatan
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 - 2014**

Sarana Kesehatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Perubahan	
									Jumlah	Persen
RS Umum (Pemerintah + swasta)	16	20	20	16	25	25	25	32	7	28
Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,00
Rumah Bersalin	0	6	1	2	7	7	8	5	-2	-28,57
Puskesmas Perawatan	63	66	66	68	71	77	79	79	2	2,60
Puskesmas Non Perawatan	144	141	157	172	177	175	185	190	15	8,57
Puskesmas Keliling	72	129	437	107	205	205	178	198	-7	-3,41
Puskesmas Pembantu	518	589	586	491	499	448	465	450	2	0,45
Polindes dan poskesdes	536	414	755	902	986	876	940	892	16	1,83
Posyandu	2.241	2.701	2.822	2.876	2.869	2.990	3.016	3.066	76	2,54

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

Indikator yang digunakan untuk menilai ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan meliputi ratio posyandu persatuan balita, ratio Puskesmas, poliklinik dan Pustu persatuan penduduk dan ratio Rumah Sakit Persatuan Penduduk. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 48. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Per Satuan Penduduk

SARANA KESEHATAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Puskesmas	172	207	223	240	248	252	264	269
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk	2,5	2,99	3,16	3,2	3,34	3,28	3,36	3,35
Jumlah Puskesmas Pembantu	471	589	586	491	499	448	465	450
Rasio Pustu per 10.000 penduduk	2,32	2,8	2,7	2,2	1,9	1,94	1,97	1,87
Jumlah Posyandu	2.406	2.701	2.822	2.886	2.902	2.990	3.016	3.103
Rasio Posyandu dalam 1.000 balita	11,6	11,6	11,9	11,4	12,9	-	-	-
Rasio Posyandu per 1.000 penduduk	-	-	-	-	-	1,30	1,28	1,29
Jumlah RS	21	21	21	25	25	25	25	32
Rasio RS terhadap 1.500 penduduk	1,6	1,5	1,5	1,7	1,7	0,02	0,02	0,02
Jumlah TT	1.032	1.163	141	1.607	1.811	1.574	2.068	2.325
Rasio TT terhadap 1.500 penduduk	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,54	1,57	1,61
Jumlah TT Kelas III	660	710	799	908	943	943	943	960
Rasio terhadap 1500 penduduk sasaran jamkesmas + Bahteramas	0,7	0,7	0,8	0,9	1	1	1	1,26

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

b. Rasio Medis Persatuan Penduduk

Pada tabel dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan rasio dokter spesialis dari 3,07 padat tahun 2011 menjadi 5 tahun 2014 (4per 100.000), begitu pula dokter umum meningkat dari 19,5 menjadi 20 (standar 25 per 100.000 penduduk). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih membutuhkan tenaga medis, dan bila hal ini tidak segera dipenuhi maka implikasinya adalah kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tidak terjamin.

c. Rasio Tenaga Kesehatan persatuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan di luar dokter juga menunjukkan perbaikan, ratio bidan meningkat dari 112 per 100.000 penduduk menjadi 263 (standar 75 per 100.000 penduduk). Begitu pula tenaga kesehatan lainnya juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan ratio tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan tenaga-tenaga sanitasi, farmasi dan perawat yang belummenuhi standar kebutuhan.

d. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Di Provinsi Sulawesi Tenggara rasio Posyandu terhadap Desa adalah 1,36, yang artinya terdapat Desa yang memiliki 2 Posyandu. Bila di dibandingkan dengan jumlah Balita dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap Posyandu memiliki 86 – 89 balita atau dengan kata bahwa sampai dengan tahun 2012 Rasio Posyandu per 1000 balita 12. Pencapaian ini sudah cukup baik, karena dalam satu Posyandu idealnya 100 orang balita. Dengan demikian indeks rasio capaian kinerja sudah diatas >100.

e. Rasio Puskesmas per satuan penduduk

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat Rasio Puskesmas per 30000 penduduk yang cenderung semakin baik yakni dari setiap 12.000 satu Puskesmas menjadi 7.500 orang setiap Puskesmas. Begitu pula bila dibandingkan dengan standar menurut Kementerian Kesehatan RI (1 : 30.000 penduduk) dapat dijelaskan bahwa ketersediaan Puskesmas bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

f. Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk

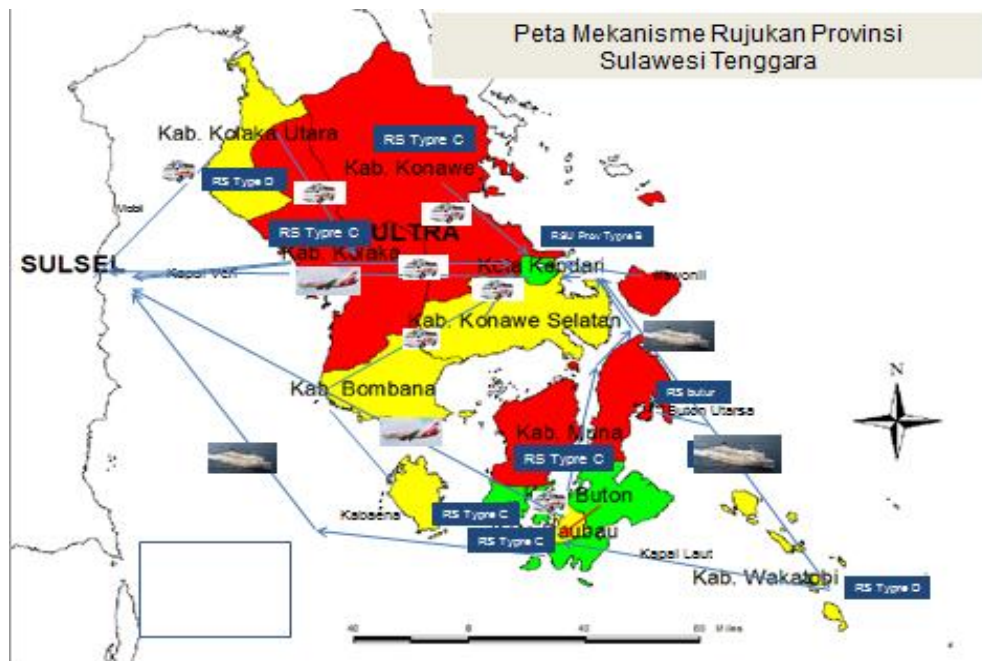
Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat Rasio Puskesmas Pembantu per 10000 penduduk yang cenderung semakin baik yakni rata-rata setiap Pustu memiliki sasaran penduduk 3000 – 5000 orang. Begitu pula bila dibandingkan dengan standar menurut Kementerian Kesehatan RI (1 : 10.000 penduduk) dapat dijelaskan bahwa ketersediaan Puskesmas Pembantu bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

g. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Ketersediaan Rumah Sakit diukur dengan Rasio terhadap penduduk atau per 150.000 penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi, dari aspek kuantitatif ketersediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan bukan masalah. Hal ini dijelaskan bahwa Rasio rumah sakit terhadap penduduk (per 150000 penduduk) memiliki nilai >1.0 , yang artinya keberadaan rumah sakit sudah diatas ambang batas minimal menurut Kementerian Kesehatan. Namun demikian, permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah kualitas pelayanan kesehatan. Begitu pula ketersediaan TT Kelas III, menunjukkan perbaikan yakni dari 0,8 per 1500 penduduk menjadi 1,2 per 1500 penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketersediaan tempat tidur, secara kuantitatif sudah dapat ditanggulangi.

Hal yang menarik adalah pengembangan sistem rujukan antara regeonal. Bila akses rujukan yang dilakukan mengikuti alur transportasi secara regeonal, hal ini akan berdampak terhadap resiko yang sangat besar terhadap kematian. Di regeonal kepulauan misalnya transportasi rujukan menggunakan kapal laut. Adapun gambaran sistem rujukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 5. Mekanisme Rujukan



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

h. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga yang bekerja di pelayanan kesehatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2007 jumlah tenaga kesehatan sebanyak 3.851 orang menjadi 6.980 tahun 2011.



Tahun 2014 berjumlah 11.856, terjadi penambahan sebanyak 8.005 orang (207,86%). Persentase Penambahan yang paling besar adalah tenaga farmasi sebesar 193,6%, Bidan sebesar 124,3% dan dokter umum sebesar 119,8%. Perkembangan jumlah Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 49. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2007 – 2014**

Tenaga Kesehatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Perubahan	
									Jumlah	Persen
Dokter Spesialis	47	51	54	60	70	89	99	125	36	40,45
Dokter Umum	202	300	299	352	444	470	421	418	-52	-11,06
Dokter Gigi	58	78	77	85	110	169	181	160	-9	-5,33
Perawat	2.017	3.069	2.999	3.153	3.365	3.384	3.512	4.089	705	20,83
Bidan	662	1.144	1.244	1.500	1.485	2.574	3.045	3.152	578	22,46
Tenaga Farmasi dan Apoteker	157	124	155	199	461	497	640	691	194	39,03
Ahli Gizi	385	443	507	576	581	595	586	857	262	44,03
Tenaga Sanitasi/Kesmas	323	421	491	489	464	1.927	2.150	2.364	437	22,68
Total	3.851	5.630	5.826	6.414	6.980	9.705	10.634	11.856	2.151	22,16

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

Sehubungan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dapat dijelaskan melalui indikator seperti pada tabel berikut.

**Tabel 50. Rasio Keadaan Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk
di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2014**

No	Tenaga Kesehatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Dokter Spesialis	47	51	54	60	70	89	99	125
	Rasio Dokter Spesialis (4 Per-100.000 Pddk)	2,31	2,4	2,55	2,69	3,07	4	4	5
2.	Jumlah Dokter Umum	202	300	299	352	444	470	421	418
	Rasio Dokter Umum (25 Per-100.000 Pddk)	9,94	14,4	14,12	15,77	19,5	20	18	17
3.	Jumlah Dokter Gigi	58	78	77	85	131	169	181	160
	Rasio Dokter Gigi (6 Per-100.000 Pddk)	2,31	3,75	3,63	3,81	5,75	7	8	7
4.	Jumlah Perawat	2.017	3.069	2.999	3.153	3.349	3.384	3.512	4.089
	Rasio Perawat (158 Per-100.000)	99,3	147	141,6	141,2	147	147	149	156
5.	Jumlah Bidan	662	1.144	1.244	1.500	1.779	2.574	3.045	3.152
	Rasio Bidan (75 Per-100.000 Pddk)	32,6	55,4	58,7	67,2	78,1	112	260	263
6.	Rasio Tenaga Farmasi dan Apoteker	157	124	155	199	477	497	640	691
	Rasio Tenaga Kefarmasian (28 Per-100.000 Pddk)	2,7	2,6	4,1	6,1	20,9	11	16	29
7.	Jumlah Ahli Gizi	385	443	507	576	581	595	586	857
	Rasio Ahli Gizi (25 Per-100.000 Pddk)	19	21,3	23,9	25,8	25,5	26	25	34
8.	Jumlah Tenaga Sanitasi	323	421	491	489	464	1.927	2.150	2.364
	Rasio Tenaga Sanitarian (30 Per-100.000 Pddk)	15,9	29,3	23,2	21,9	20,4	24	20	21

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

i. Rasio Medis per satuan Penduduk

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan rasio dokter spesialis dari 2,31 pada tahun 2007 menjadi 5 tahun 2014 (4per 100.000), begitu pula rasio dokter umum meningkat dari 9,94 tahun 2007 menjadi 17 pada tahun 2014(standar 25 per 100.000 penduduk). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih



memhutuhkan tenaga medis, dan bila hal ini tidak segera dipenuhi maka implikasinya adalah kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tidak terjamin.

j. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan di luar dokter juga menunjukkan perbaikan, Rasio bidan meningkat dari 78,1 per 100.000 penduduk menjadi 263 (standar 75 per 100.000 penduduk). Begitu pula tenaga kesehatan lainnya juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Rasio tersebut. Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan tenaga-tenaga sanitasi, farmasi dan perawat yang belum memenuhi standar kebutuhan.

k. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pebaikan gizi, Pengendalian Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun pencapaian pelaksanaan program seperti pada Tabel 50.

Cakupan pelayanan ibu hamil berkualitas (K4) meningkat dari 82,09% tahun 2011 menjadi 85,76% tahun 2014. Begitu pula cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan ibu nifas, penanganan komplikasi dan peserta KB aktif juga menunjukkan peningkatan.

Kunjungan neonatal lengkap menunjukkan peningkatan yakni 74,89% tahun 2007 menjadi 91,62% tahun 2014. Begitu pula cakupan penanganan komplikasi walaupun belum mencapai target, tetapi capaiannya cenderung meningkat.

Sedangkan cakupan Balita gizi buruk yang dirawat, Rasio capaian kinerjanya sangat baik yaitu 100. Hal ini menunjukkan bahwa penderita gizi buruk yang ditemukan semuanya dirawat.

Tabel 51. Pencapaian Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Tahun 2007-2014
Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	INDIKATOR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Cakupan Kunjungan neonatal lengkap	74,89	75,33	75,85	83,91	87,71	98,11	73,5	91,62
2	Penanganan kasus gizi buruk	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	70,75	75,76	84,32	85,87	82,09	80,36	76,09	85,76
4	Cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan kompeten	71,45	80,38	84,32	85,87	89,03	79,52	81,95	85,81
5	Cakupan desa UCI	75	76	78	79,2	80,2	75,36	60,59	77,88
6	Cakupan masyarakat miskin yg mendapat yankes dasar	50	51,07	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat yankes rujukan	50	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin	80	83,3	86,7	90	93,3	94	100	98,47
9	Cakup Penemuan dan Penanganan BTA Positif	79	70	49	67	77	77	79,81	89,59
10	Cakupan Rumah Tangga dengan PHBS	19,73	21,9	26,4	38,54	38,72	50,46	49,75	49,8
11	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	44,77	65,56	62,6	62,6	54,62	62,52	63,01	63,15

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

Cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari 75 tahun 2007 menjadi 77,88% tahun 2014. Cakupan penemuan kasus TB BTA+ belfluksi. Pada tahun 2007 terjadi penurunan dari 79% tahun 2009 menjadi 49%, kemudian menunjukkan peningkatan menjadi 89,59% tahun 2014.

Capaian program Rumah Tangga Ber-PHBS pada tahun 2008 sebesar 21,9 % dan pada tahun 2011 sebesar menjadi 38,72%, dengan sasaran target 49,8 % ditahun 2014. Sedangkan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas menunjukkan peningkatan yakni dari 44,77 tahun 2007 menjadi 63,15% tahun 2014.

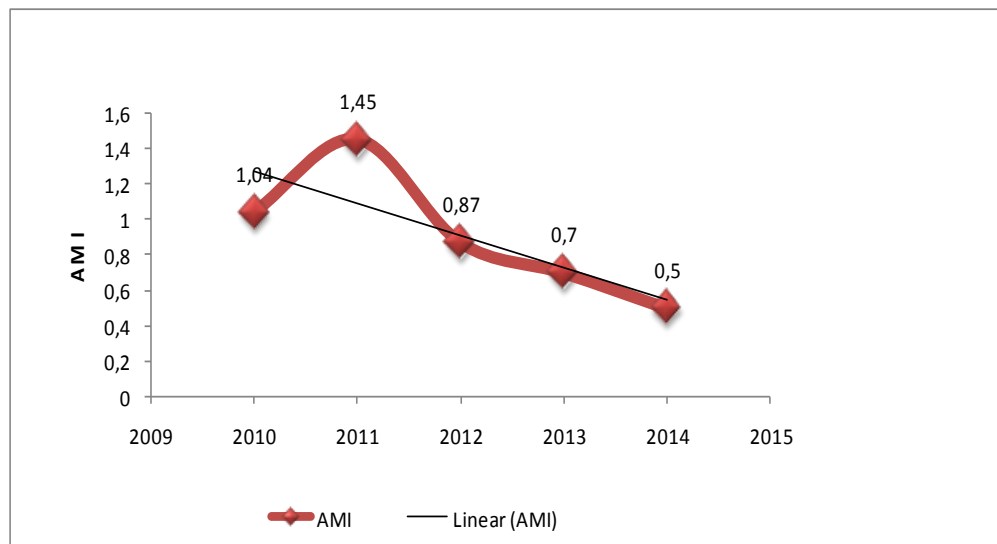
I. Angka Kesakitan

Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.

Kasus Malaria di Sulawesi Tenggara tahun (2010-2014) cenderung berfluktuatif, tahun 2010 jumlah kasus 2.385 (AMI 1,04), tahun 2011 jumlah kasus 3.323 (AMI 1,45), tahun 2012 jumlah kasus 2.015 (AMI 0,87), namun di tahun 2012-2014 jumlah kasus cenderung menurun dari tahun 2011 jumlah kasus 3.323 (AMI 1,04), tahun 2012 jumlah kasus 2.015 (AMI 0,87) dan pada Tahun 2013 jumlah kasus yakni sebesar 1.640 (AMI 0,70) dan pada Tahun 2014 1.213 kasus (AMI 0,50)

Angka kesakitan Malaria dikatakan tinggi apabila angka Annual Malaria Insidens (AMI) > 10 per 1.000 penduduk dan rendah apabila < 10 per 1.000 penduduk. Jika diperhatikan AMI selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa angka kesakitan Malaria di Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang dengan AMI 15.88 – 18.29. Dengan demikian Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori daerah endemik. AMI Malaria tahun 2010 – 2014 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 6. Angka Kesakitan (Annual Paracite Incidenmce/API) & Jumlah Kasus Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2014



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra Tahun 2015

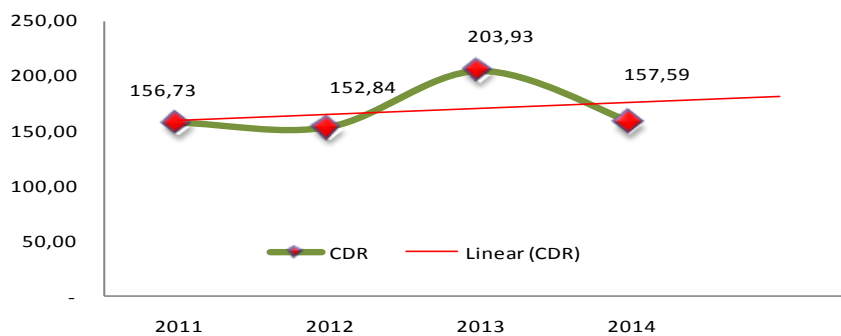
Gambar diatas menunjukkan exponetial trendline AMI malaria tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan oleh karena itu program penanggulangan Malaria menjadi



perhatian serius untuk mengeliminasi kejadian malaria dalam rangka mencapai target AMI 5 per 1.000 penduduk tahun 2014.

Penemuan kasus TB Paru/Case Notification Rate (CNR) dilakukan di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, dan RS). Berdasarkan profil kesehatan kabupaten/kota CNR TB Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara penemuan kasus TB menunjukkan peningkatan yakni tahun 2011 sebanyak 156,73 pada tahun 2014 menjadi 157,59. Dengan demikian CNR TB Paru hampir mencapai target yang ditetapkan, yaitu 70%. Gambaran CDR TB Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 – 2014 ditunjukkan pada gambar 7.

**Gambar 7. Angka Penemuan Kasus/CNR (Case Notification Rate) TB Paru
Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2014**

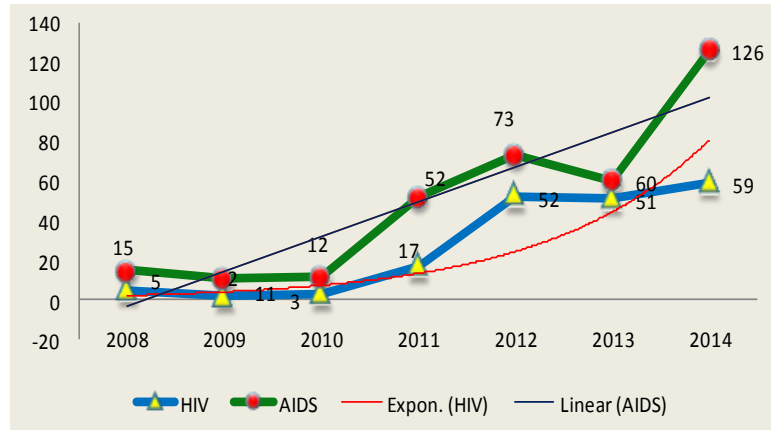


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra Tahun 2015

Gambar diatas menunjukkan exponential trendline CNR TB Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 – 2014 cenderung stabil. Diharapkan efektivitas menjangkit kasus TB paru meningkat, karena semakin banyak kasus yang ditemukan, maka pemutusan rantai penyebarannya akan semakin cepat.

Kegiatan penemuan kasus HIV/AIDS di Sulawesi Tenggara dilaksanakan melalui kegiatan zero survei terhadap kelompok beresiko, baik yang beresiko tinggi maupun rendah. Berdasarkan laporan program, jumlah penderita HIV/AIDS hingga 2013 berjumlah 111 kasus dan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 185 kasus yang terdiri dari 59 kasus HIV dan 126 kasus AIDS. Perkembangan jumlah kasus dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kasus HIV/AIDS tahun 2008 – 2014 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 8. Jumlah Kasus HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Laporan Tahunan Program P2ML Dinkes Prov. Sultra dan Profil Kes. Kab/Kota Tahun 2015

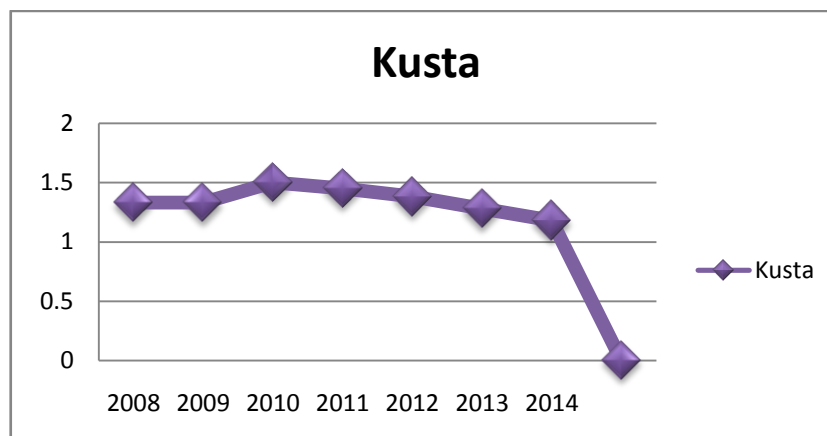
Gambar diatas menunjukkan, kasus HIV/AIDS tahun 2008 berjumlah 20 kasus, tahun 2009 berjumlah 13 kasus, tahun 2010 berjumlah 15 kasus, tahun 2011 berjumlah 69 kasus, tahun 2012 berjumlah 125 kasus, tahun 2013 berjumlah 111 kasus dan tahun 2014 sebanyak 185 kasus. Berdasarkan eksponensial trendline jumlah kasus AIDS cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kasus HIV, dengan demikian dalam waktu jangka panjang penurunan penemuan kasus HIV akan disertai dengan peningkatan jumlah kasus AIDS hal ini terjadi apabila surveilans tidak mampu melakukan pelacakan kasus dengan baik. Oleh karena itu perlu peningkatan kewaspadaan dini dan penatalaksanaan kasus, serta melibatkan masyarakat dalam penemuan kasus secara dini untuk mencegah penularan lebih luas atau terjadinya ledakan kasus secara tiba-tiba.

Angka Prevalensi Kusta di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 dilaporkan sebesar 1,18 per 10.000 penduduk (lebih tinggi dari target nasional < 1 per 10.000 penduduk). Total kejadian kasus tahun 2014 berjumlah 331 penderita yang terdiri dari laki-laki 198 penderita, perempuan 133 penderita. Dari 331 penderita kusta tahun 2014 terdiri dari 36 penderita kusta type PB (Pausi Basiler) dan 295 penderita type MB (Multi Basiler).

Dari 36 kasus type PB 33 kasus (93.94%) diantaranya dinyatakan telah selesai melakukan pengobatan tepat waktu (RFT=Release from Treatment) dan dari 295 penderita type MB, 189 penderita (87.50%) diantaranya juga dinyatakan (RFT). Berdasarkan data tersebut tahun 2011 RFT Kusta Provinsi Sulawesi Tenggara belum mencapai target yang telah ditetapkan (> 90%) khususnya pada type MB.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, prevalensi penderita Kusta tahun 2008 – 2014 cenderung berfluktuasi. Tahun 2008 (1,33), tahun 2009 (1,33), tahun 2010 (1,50) dan tahun 2011 (1,45), tahun 2012 (1,38), tahun 2013 (1,28), tahun 2014 (1,18) (. Gambaran Prevalensi penyakit Kusta ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 9. Prevalensi Penderita Kusta per 10.000 penduduk



Sumber : Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan Kab./Kota) Tahun 2014

Gambar diatas menunjukkan prevalensi Kusta di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2008–2014 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu < 1/10.000 penduduk.

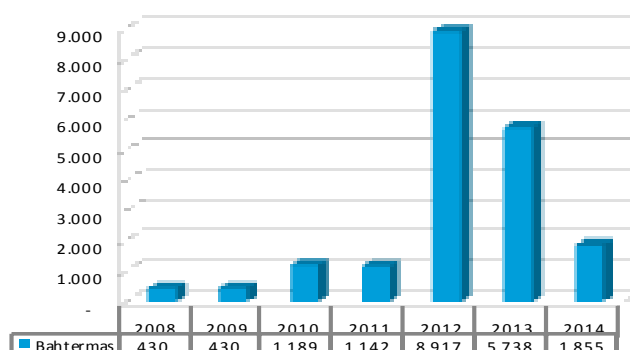
Kurun waktu 2008–2014, angka prevalensi penyakit kusta secara nasional juga belum menunjukkan penurunan, tahun 2008 sebesar menjadi 1.05 per 10.000 penduduk, tahun 2008-2009 menurun menjadi 1.33 per 10.000 penduduk, tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 1.5 per 10.000 penduduk dan tahun 2011 mengalami penurunan dengan angka prevalensi 1.45 pe 10.000 penduduk. Dengan demikian prevalensi kusta di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 – 2014 masih diatas prevalensi kusta secara nasional.

m. Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) Bahteramas

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pembebasan biaya pengobatan pada tahun 2008 masih sangat terbatas yakni Rp 428.449.085. Hal ini disebabkan pada tahun 2008, kegiatan pelayanan baru dilakukan mulai 1 September 2008 di RSUD Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota belum diberlakukan. Pada tahun 2009, kegiatan pelayanan mulai diberlakukan di seluruh RS Kabupaten/ Kota, dan jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp.1.087,467,992.

Gambar 10. Anggaran Jamkesmas dan Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas

Anggaran Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas





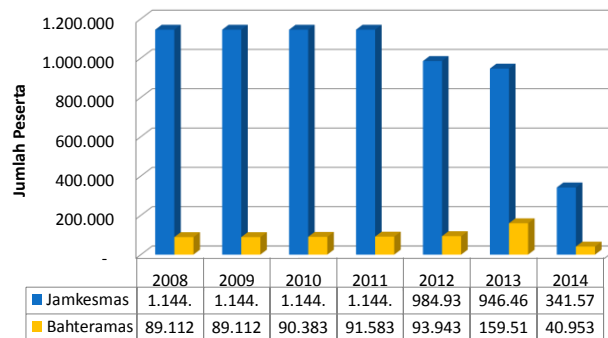
Kegiatan pelayanan semakin meningkat pada tahun 2010 tidak hanya di RS tetapi juga di Puskesmas, jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp 3,129.016,271. Untuk tahun 2011, mencapai Rp 5.856.140.225, tahun 2012 sebesar Rp. 7.878.470.849, tahun 2014 anggaran yang sudah dibayarkan Rp. 7.899.234.400.

Dengan demikian jumlah anggaran yang telah digunakan untuk program pembebasan biaya pengobatan hingga tahun 2014 ini mencapai Rp 33.181.725.479. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Jumlah sasaran program pembebasan biaya pengobatan meningkat dari 89.112 jiwa pada tahun 2008, menjadi 90.383 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 91.583 jiwa hingga tahun 2013 bertambah menjadi 159.518. Peningkatan ini merupakan penambahan quota sasaran yang juga mencakup anak-anak di Panti Asuhan, dan adanya quota kepesertaan di setiap rumah sakit. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat perkembangan kepesertaan jamkesmas dan pembebasan biaya pengobatan

Gambar 11. Kepesertaan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas

Kepesertaan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas

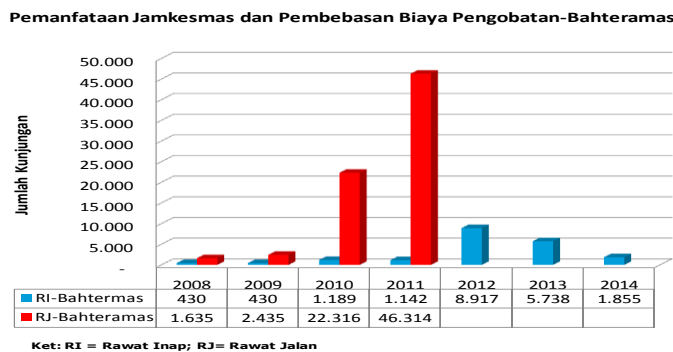


Sumber : Dinkes Prov. Sultra, Tahun 2015

Pada Tahun 2008, Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas belum dilaksanakan, dan baru dimulai pada tahun 2009 dengan jumlah kunjungan sebanyak 794 kunjungan rawat jalan tingkat lanjut.

Pada Tahun 2010, terdapat 18,685 kunjungan rawat jalan tingkat lanjut dan 160 rawat inap tingkat lanjut. Sedangkan pada Tahun 2011 menunjukkan kenaikan yang cukup pesat menjadi 43,354 RJTL dan 52 RITL. Sehingga total kunjungan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan melalui program pembebasan biaya pengobatan Bahteramas di Puskesmas sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2011 sudah mencapai 63.045 pasien.

Gambar 12. Pemanfaatan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Tahun 2015

Untuk kunjungan pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas pembebasan biaya pengobatan-bahteramas di seluruh RS di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2008 sampai September 2011 sebanyak 12.853 kunjungan. Jumlah kunjungan pada tahun 2008-2009 sebanyak 4.142 kunjungan, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 4.050 kunjungan. Kenaikan tersebut pada umumnya sebagai akibat dari semakin tersosialisasinya program ini di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat perkembangan pelaksanaan pemanfaatan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas tahun 2008-2014.

2.3.1.3. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang – bidang lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2012 mencapai 1,398,243.18 Km, yang terdiri dari 1,397.051 Km jalan nasional, 906.09 Km jalan provinsi, dan 286.09 Km jalan strategis provinsi. Kondisi jalan provinsi terdiri dari 1,128.92 Km jalan beraspal, 969.35 Km jalan non aspal.

Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat-pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang ditandai dengan meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan berstatus yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2012 mencapai 7.515,85 Km, yang terdiri dari 1.397.05 Km



jalan nasional, 906.09 Km jalan provinsi, dan 5.212,71 Km jalan Kabupaten/Kota dimana 286.09 Km diantaranya sebagai jalan strategis provinsi. Jalan dalam kondisi mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang di provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari jalan nasional dan jalan provinsi mencapai 62,95%. Tabel dibawah menunjukkan informasi kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2014.

Tabel 52. Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

No	Status	Panjang (km)	Konstruksi (km)		Kondisi (km)		
			Aspal	Non Aspal	Baik	Sedang	Rusak
1	Nasional	1.397.05	1.217,41	179,64	570,29	387,30	439,46
2	Provinsi	906.09	552.46	353.63	297.78	186.14	421.07
3	Strategis Provinsi	286.09	24.00	262.09	15.65	32.45	237.99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra, Tahun 2015

Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.

Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari – hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut.

Sampai dengan tahun 2014, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 7 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan pusat dengan luas area 93.474 Ha, dimana 81,15 % kondisi baik; 11,71 % rusak ringan; dan 7,14% rusak berat. Selain itu, terdapat 15 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan Provinsi dengan luas area 30.395 Ha, dimana 77,25 % kondisi baik; 7,83 % rusak ringan; 14,92 % rusak berat.

2.3.1.4. Pelayanan Umum Bidang Urusan Perumahan

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2014, ketersediaan rumah layak huni terjangkau telah mencapai 60 %, namun demikian ketersediaan rumah layak huni yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru mencapai 80 %. Sementara itu, ketersediaan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman untuk mendukung lingkungan yang sehat dan aman baru mencapai 30%.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat hunian, sejak tahun 2012 di Sulawesi Tenggara telah dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 15 twin blok dengan kapasitas 650 unit hunian yang berada di kota Kendari, kota Baubau, kab. Kolaka, kab. Konawe, kab. Buton dan kab. Kolaka Timur.



2.3.1.5. Pelayanan Umum Bidang Urusan Penataan Ruang

Di bidang penataan ruang, sampai dengan tahun 2012, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW seluruh Kabupaten Kota telah disusun sesuai amanat Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana di dalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I. Sebagai tindak lanjut penyusunan RTRW, lima (5) kota/kabupaten telah menetapkannya sebagai Peraturan Daerah (PERDA) tentang RTRW.

2.3.1.6. Pelayanan Umum Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan :

- a. melakukan Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku ;
- b. menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
- c. melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- f. melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
- k. melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.



2.3.1.7. Pelayanan Umum Bidang Urusan Perhubungan

Pada tabel di bawah ini menggambarkan kondisi pelayanan umum di bidang Urusan Perhubungan melalui data jumlah arus penumpang.

Tabel 53. Arus Penumpang dan Barang yang Datang dan Berangkat Melalui Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan dan Udara

No	Arus Penumpang dan Barang	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	195,202,209	239,589,837	249,424,263	250,356,316	256,123,423	298,605,218
2.	Arus Kedatangan Dengan Penyeberangan Laut (org)	834,036	762,929	794,694	797,294	805,320	934,171
3.	Arus Kedatangan Dengan Transportasi Darat (org)	21,320,410	21,654,520	23,996,472	25,321,430	28,124,521	32,624,444
4.	Arus Keberangkatan Dengan Penyeberangan Laut (org)	725,643	751,237	794,694	812,542	852,328	988,700
5.	Arus Keberangkatan Dengan Transportasi darat	172,322,120	216,421,151	223,838,403	223,425.050	225,489,120	261,567,379
6.	Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum	583,152	586,546	622,035	960,669	980,345	1,137,200
7.	Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut (ton)	121,250	124,321	126,210	128,562	131,453	152,485
8.	Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Darat (ton)	163,351	143,645	126,210	456,045	615,235	713,672
9.	Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut	101,240	105,158	131,230	134,520	139,430	161,738
10	Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Darat	197,311	213,422	238,385	241,542	280,540	325,426
11	Arus Angkutan Udara	7,932,184	8,453,046	8,021,731	8,061,355	7,410,122	8,151,134
12	Arus Kedatangan Dengan Transportasi Udara (Orang)	207,686	272,163	270,497	295,420	405,688	446,256
13	Arus Keberangkatan Dengan Transportasi Udara (orang)	210,661	279,645	237,209	304,017	412,860	454,146
14	Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara (kg)	4,314,135	4,279,936	3,972,181	4,349,449	3,778,701	4,156,571
15	Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara (kg)	3,199,702	3,621,302	3,541,844	3,112,469	2,812,873	3,094,160

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra, Tahun 2015.

2.3.1.8. Pelayanan Umum Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 54. Data Indikator Pengelolaan Lingkungan Tahun 2012 - 2014

Indikator	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Persentase Penanganan Sampah Perkotaan (2009)	50 %	58,33%	41,66%
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	18,18%	25,45%	26,36%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1/21	1/21	1/21



Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Terhadap Luas Daratan	51,8%	51,8%	51,8%
Luas Kawasan Perlindungan Daratan	46,35%	46,35%	46,35%
Luas Kawasan Lindung Laut (ha)	313,513	313,513	313,513
Emisi CO ₂	1.038 Gg CO ₂ e	1.038 Gg CO ₂ e	1.038 Gg CO ₂ e
Jumlah Perusahaan Yang Memiliki AMDAL	151	181	187
Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah	5	5	10
Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya	80%	100%	100%
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dipantau Kualitas Udara Ambienya Dan Diinformasikan Mutu Udara Ambienya	33,33%	100%	100%
Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan	100%	100%	100%

Sumber : BLH Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.1.9. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pertanahan

Pada urusan pertanahan digambarkan perkembangan realisasi sertifikasi tanah menurut kabupaten/kota pada tahun 2014, sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini :

Tabel 55. Realisasi Sertifikasi Tanah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

NO.	KABUPATEN/KOTA	BIDANG	LUAS (HA)
1.	Buton	3.894	13.309.367
2.	Muna	4.597	26.648.826
3.	Konawe	4.602	29.155.497
4.	Kolaka	1.103	4.373.905
5.	Konawe Selatan	4.747	28.535.784
6.	Bombana	1.535	1.094.881
7.	Wakatobi	3.444	849.747
8.	Kolaka Utara	3.341	17.102.573
9.	Buton Utara	3.151	36.520.594
10.	Konawe Utara	3.028	18.159.846
11.	Kota Kendari	4.615	3.360.067
12.	Kota Baubau	1.574	2.104.104
13.	Kolaka Timur	-	-
14.	Konawe Kepulauan	-	-
	Prov. Sulawesi Tenggara		
	2014	39.631	181.215.191
	2013	504.089	91.836.839
	2012	51.377	29.791
	2011	23.541	175.749.665
	2010	16.707	54.963.811
	2009	38.877	168.910.420

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.3.1.10. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Di bidang kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu

pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua peristiwa kependudukan akibat LAMPID (Lahir, Meninggal, Pindah dan Datang) tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.

Gambar 13. Gambaran Umum Pemanfaatan E-KTP



2.3.1.11. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 56. Jumlah Panti Asuhan, Kapasitas Tampung dan Anak Asuh

No.	Kabupaten / Kota	Panti Asuhan	Kapasitas Tampung	Anak Asuh	Pengasuh
1.	Buton	1	78	78	6
2	Muna	16	742	742	141
3	Konawe	9	445	445	66
4	Kolaka	16	793	793	171
5	Konawe Selatan	8	405	405	69
6	Bombana	1	45	45	7
7	Wakatobi	-	-	-	-
8	Kolaka Utara	3	150	150	29
9	Buton Utara	2	94	94	3
10	Konawe Utara	1	25	25	2
11	Kota Kendari	13	749	749	121
12	Kota Baubau	5	235	235	44
13	Kolaka Timur	-	-	-	-
14	Konawe Kepulauan	-	-	-	-
Prov. Sultra					
	2014	75	3.761	3.761	659
	2013	75	3.761	3.761	659
	2012	74	3.748	3.748	270
	2011	74	3.748	3.748	270
	2010	69	2.825	2.825	213



2009	66	2.257	2.257	213
2008	78	3.350	2.567	285
2007	73	2.850	2.531	390

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015 dan Dinas Sosial Prov. Sultra

2.3.1.12. Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 57. Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Klinik Keluarga Berencana	Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa	Jumlah
1.	Buton	17	95	112
2	Muna	81	151	232
3	Konawe	79	361	440
4	Kolaka	30	135	165
5	Konawe Selatan	40	361	401
6	Bombana	23	139	162
7	Wakatobi	22	100	122
8	Kolaka Utara	21	133	154
9	Buton Utara	11	90	101
10	Konawe Utara	24	146	170
11	Kolaka Timur*	20	133	153
12	Konawe Kep.*	15	96	111
13	Muna Barat	25	86	111
14	Buton Tengah	12	75	87
15	Buton Selatan	12	70	82
16	Kota Kendari	50	64	114
17	Kota Baubau	21	43	64
	Sulawesi Tenggara	503	2.280	2.783

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.3.1.13. Pelayanan Umum Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala provinsi
 - Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi
 - Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial skala provinsi
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi
 - Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala provinsi
 - Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala provinsi
 - Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi
 - Evakuasi korban bencana skala provinsi
4. Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi
5. Pelaksanaan jaminan sosial skala provinsi

2.3.1.14. Pelayanan Umum Bidang Urusan Ketenagakerjaan

a. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja baik PMDN maupun PMA terus meningkat sejalan dengan peningkatan PMDN dan PMA. sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 58. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**)
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Berkerja pada Perusahaan PMA/PMDN	55.162	59.974	65.162	70.977	76.950
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	5.043	5.253	5.826	5.959	6.353
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 12

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2012

b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan, Keahlian dan Kompetensi Tenaga Kerja

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, keahlian dan kompetensi terus meningkat dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 59. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

No.	Kegiatan	Tahun/Orang						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pelatihan Berbasis Kompetensi	130	256	222	464	1.600	1.221	1.940
2.	Pelatihan Berbasis Masyarakat	697	150	270	480	380	400	500
3.	Pelatihan Kewirausahaan	110	100	150	300	480	510	960
	Jumlah	937	506	642	1.244	2.360	2.131	3.400

Sumber : Disnakertrans Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.1.15. Pelayanan Umum Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berbagai upaya peningkatan melalui pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi lainnya terus meningkat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 60. Pengelolaan Perkoperasian di Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	84,78	84,82	84,91	84,78	84,99
2	Persentase Omzet Usaha Mikro dan Kecil (%)	0,15	0,31	0,20	0,20	0,24
3	Persentase Kredit per UMKM (%)	0,71	0,89	0,80	0,80	0,82
4	Jumlah BPR/LKM Beroperasi Aktif (unit)	43	51	45	10	10
5	Jumlah Koperasi Berprestasi/Berkualitas	12	24	38	12	12
6	Jumlah Wirausaha Baru (Unit)	10.785	11.100	10.800	70	90
7	Persentase Pengurus/Karyawan Koperasi yang Pernah Mengikuti Diklat Perkoperasian (%)	2,64	9,30	20,53	20,53	22,55
8	Persentase UMKM yang Pernah Mengikuti Diklat	0,31	0,42	0,4	0,67	0,77

Sumber : Dinkop, KUKM Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.1.16. Pelayanan Umum Bidang Urusan Penanaman Modal

Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alam, tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal untuk berinvestasi. Kondisi ini



diperlihatkan melalui berkembangnya modal investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus meningkat dari Tahun 2007 sampai Tahun 2014 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 61. Banyaknya Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Menurut Jenis Proyek Tahun 2014

No.	Jenis Proyek	Modal Dalam Negeri		Modal Luar Negeri	
		Banyaknya Proyek	Investasi (Juta Rp)	Banyaknya Proyek	Investasi (000 US \$)
1.	Pertanian	39	7.344.688	21	102.011
	1.1. Tanaman Pangan	0	0	0	0
	1.2. Perkebunan	28	6.947.683	8	78.288
	1.3. Perikanan	11	397.005	11	23.722
	1.4. Kehutanan	0	0	2	1
2.	Pertambangan	5	251.929	44	1.077.453
3.	Industri	23	12.376.342	43	229.044
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	2	3.088.018	2	90.000
5.	Bangunan	1	190.000	6	25.500
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1	8.400	17	24.776
7.	Angkutan dan Telekomunikasi	3	122.816	4	26.565
8.	Keuangan Persewaan dan jasa	0	0	0	0
9.	Jasa-jasa	10	67.127	81	1.424.187
	Jumlah				
	2014	123	30.794.038	239	3.104.650
	2013	79	21.187.523	142	1.381.922
	2012	76	18.807.355	133	1.388.440
	2011	77	18.937.141,79	123	891.239,34
	2010	76	14.439.228,33	80	55.865,14
	2009	75	13.204.509,30	81	1.106.108.04
	2008	52	4.033.750.00	49	29.381.110.00
	2007	3	4.033.750.00	9	13.349.00
	2006	1	2.040.000.00	2	12.949.00

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.3.1.17. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya

Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

- Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian dan perfilman di daerah;
- Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah; dan
- Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang sejarah dan nilai budaya di daerah.

2.3.1.18. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator kinerja, meliputi jumlah peserta seleksi paskibraka tingkat nasional, jumlah pemuda yang ikut seleksi pertukaran pemuda, jumlah pemuda yang ikut seleksi kapal pemuda nusantara. Di bidang keolahragaan, meliputi : jumlah pembinaan atlet yang dilaksanakan, jumlah kompetisi olahraga yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 62. Pencapaian Kinerja Pelayanan Umum Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Realisasi Capaian Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
A	Kepemudaan					
1	Jumlah Pemuda yang Berperan di Organisasi	6	6	6	6	78
2	Jumlah Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
B	Keolahragaan					
1	Jumlah Olahraga yang Dibina dan Dimasyarakatkan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 cabor
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 cor

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.1.19. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Adanya pembagian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik ke dalam urusan wajib pemerintahan oleh pemerintah daerah, permasalahan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah sekaligus dalam kerangka pengawalan kebijakan politik dalam negeri.

Suasana kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah rumah-rumah ibadah sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian halnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan juga dapat berjalan dengan baik. Sementara itu kerukunan dan toleransi hidup beragama juga semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan Pesparawi tahun 2012 di Kota Kendari dan pelaksanaan event-event keagamaan lainnya dengan melibatkan umat dari berbagai agama. Di samping itu, rendahnya intensitas dan frekuensi kasus konflik yang berlatar belakang agama menunjukkan bahwa kualitas hidup beragama di Sulawesi Tenggara semakin meningkat.

Situasi ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2012 senantiasa tetap kondusif dan terkendali. Indikator tetap kondusif dan terkendalnya stabilitas ketenteraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2008 maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) antara tahun 2008 – 2013 di beberapa kabupaten/Kota dan di akhir tahun 2012 pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur Sultra dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Baubau yang berlangsung dalam suasana tertib, aman dan demokratis.

Pemilih yang terdaftar pada Pilkada Gubernur/ Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 sebanyak 1.701.698 orang yang tersebar pada 4.743 TPS pada 12 (dua belas) Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3.1.20. Pelayanan Umum Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2.3.1.21. Pelayanan Umum Bidang Urusan Ketahanan Pangan

a. Produksi

Secara Umum produksi 12 jenis komoditas pangan penting tahun 2011 mengalami kenaikan antara 0,92 persen pada komoditas ubi kayu hingga 64,05 persen pada komoditas buah-buahan, begitu pula pada komoditas padi mengalami kenaikan sebesar 9,86 persen dan kedelai 23,93 persen.

Khusus untuk komoditas pangan hewani produksi tahun 2011 semua mengalami penurunan : daging sapi dan kerbau turun 26,95 persen, daging ayam turun 29,21 persen, komoditas telur turun sebesar 14,98 persen, dan komoditas perikanan mengalami penurunan 16,31 persen.



Produksi pangan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir periode 2009-2011 yang mengalami penurunan rata-rata pertahun pada komoditas jagung 2,35 persen, kacang tanah 5,51 persen, ubi kayu 13,55 persen, sayuran 5,90, daging sapi dan kerbau 11,62 persen, daging ayam 5,69 persen, telur 1,91 persen serta ikan 44,89 persen, sedangkan 4 komoditas lainnya mengalami pertumbuhan mulai dari komoditas ubi jalar naik 1,78 persen, padi naik 9,86 persen, kedelai naik 23,93 persen, serta komoditas buah-buahan, naik sebesar 64,05 persen per tahun.

b. Ketersediaan

Mengacu pada volume produksi tahun 2011 dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecer serta dikonversi dalam bentuk yang diperdagangkan, maka ketersediaan bahan pangan Sulawesi Tenggara untuk 12 jenis komoditas yang mengalami penurunan terutama buah-buahan 38,53 persen, sayuran 38,16 persen, daging ayam 29,21 persen, daging sapi dan kerbau 26,95 persen, telur 19,48 persen, ikan 16,31, ubi kayu 10,52 persen, jagung 9,14 persen, serta kacang tanah 8,13 persen. Namun demikian ketersediaan untuk beras naik 7,33 persen, kedelai naik 90,79 persen, dan ubi jalar naik 4,63 persen.

Dalam 3 tahun terakhir periode 2009-2011, ketersediaan pangan yang mengalami penurunan rata-rata pertahun terutama : jagung 2,35 persen, kacang tanah 5,51 persen, ubi kayu 19,27 persen, sayuran 5,91, daging sapi dan kerbau 11,62 persen, daging ayam 5,69 persen, telur 1,91 persen, dan ikan 44,89 persen. Penyediaan untuk 4 komoditas lainnya mengalami pertumbuhan pertahun yang cenderung baik mulai dari beras naik 9,47 persen, kedelai naik 23,93 persen, ubi jalar naik 1,78 persen, dan buah-buahan naik 64,04 persen.

c. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan

Neraca pangan yang disusun berdasarkan perkiraan produksi dan kebutuhan dari 12 komoditas menunjukkan bahwa neraca tahun 2014 hanya komoditas telur yang mengalami defisit sebesar 6,11 ton atau 108,61 persen, seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 63. Perkiraan Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2010 dan 2011

No	KOMODITAS	Tahun 2010 (Ton)				Tahun 2011 (Ton)			
		Ketersediaan	Kebutuhan	Perimbangan		Ketersediaan	Kebutuhan	Perimbangan	
				Volume	%			Volume	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Pangan Nabati								
1	Beras	264.807,94	216.203,63	48.604	18,35	284.229,86	220.506,62	63.723,24	22,42
2	Jagung	63.614,00	10.962,00	52.652	82,77	57.797,45	11.180,17	46.617,28	80,66
3	Kedelai	2.904,75	89,30	2.815	96,93	5.542,05	91,08	5.450,97	98,36
4	Kacang Tanah	4.299,54	870,71	3.429	79,75	3.949,80	888,04	3.061,76	77,52
5	Ubi Jalar	22.267,52	1.875,37	20.392	91,58	23.298,88	1.912,70	21.386,18	91,79
6	Ubi Kayu	156.604,60	13.752,73	142.852	91,22	140.122,50	14.026,44	126.096,06	89,99
7	Sayuran	63.478,65	7.501,49	55.977	88,18	39.254,96	7.650,79	31.604,17	80,51
8	Buah-buahan	194.505,08	5.224,25	189.281	97,31	119.560,60	5.328,23	114.232,37	95,54
II	Pangan Hewani								
9	Daging Sapi + Kerbau	3.775,68	156,28	3.619	95,86	2.758,23	159,39	2.598,84	94,22
10	Daging Ayam	13.527,88	1.875,37	11.653	86,14	9.576,21	1.912,70	7.663,51	80,03
11	Telur	7.903,25	13.015,98	-5.112,73	-64,69	6.363,43	13.275,03	-6.911,60	-108,61
12	Ikan	274.952,48	20.517,47	254.435	92,54	230.113,87	20.925,81	209.188,06	90,91



Pada Tahun 2011, surplus pada 11 komoditas yang cukup tinggi mengindikasikan kinerja produksi komoditas pangan tersebut cukup baik, sehingga kebutuhan konsumsi penduduk Sulawesi Tenggara masih bisa terpenuhi dari produksi dalam daerah meskipun laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat.

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata peluang individu untuk memperoleh pangan. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi per kapita pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir 2009-2011, kinerja ketersediaan energi turun 2,72 persen dan ketersediaan protein turun 4,02 persen. Pada tahun 2011, tingkat ketersediaan energi mencapai 2.534 kkal/kapita/hari dan protein mencapai 84,73 gram/kapita/hari. Capaian ketersediaan tersebut sudah berada diatas kebutuhan yang direkomendasikan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004.

Tabel 64. Ketersediaan Pangan Dalam Bentuk Energi

No	Jenis Komoditi	Realisasi Ketersediaan Per Tahun			
		2012	2013	2014	Pertumbuhan (%)
1.	Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.701	2.824	2.780	0,95
2.	Protein (Gram/Kapita/Hari)	74,78	69,55	73,95	(0,38)
3.	Anjuran WKNPG-VIII-2004 :				
	a. Energi (kkal/Kapita/Hari)	2.200	2.200	2.200	0
	b. Protein (gram/Kapita/Hari)	57	57	57	0

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sultra (data diolah) Tahun 2015

2.3.1.22. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 65. Pembagian Daerah Administrasi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	UPT	Desa + Kelurahan
1.	Buton	Pasarwajo	7	12	83	-	95
2	Muna	Raha	22	26	123	3	149
3	Konawe	Unaaha	23	57	284	1	341
4	Kolaka	Kolaka	12	33	102	-	135
5	Konawe Selatan	Andoolo	22	15	336	1	351
6	Bombana	Kasipute	22	22	116	2	138
7	Wakatobi	Wangi-Wangi	8	25	75	-	100
8	Kolaka Utara	Lasusua	15	6	127	-	133
9	Buton Utara	Buranga	6	11	79	1	90
10	Konawe Utara	Asera	10	11	134	2	145
11	Kota Kendari	Kendari	10	64	-	-	64
12	Kota Baubau	Baubau	8	43	-	-	43
13	Kolaka Timur	Tirawuta	12	15	118	-	133
14	Konawe Kepulauan	Wawonii	7	7	88	-	95
15	Muna Barat	Laworo	11	5	81	-	86
16	Buton Tengah	Labungkari	7	9	68	-	77
17	Buton Selatan	Batauga	7	10	60	-	70
	Prov. Sultra	Kendari	209	371	1.874	10	2.245

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.3.1.23. Pelayanan Umum Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus



meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 66. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Jumlah Jaringan Komunikasi	195 BTS
Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal	2 dan 3
Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal	8 dan 3
Persentase Jumlah Penduduk yang Menggunakan Telepon dan HP	40%

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.1.24. Pelayanan Umum Bidang Urusan Perpustakaan.

Di bidang perpustakaan selama tahun 2008 hingga 2014 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 67. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Perpustakaan Daerah

No	Uraian	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	227,230	236,996	173,036	181,141	208,537	13,860	10,980
2.	Jumlah Judul Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	-	400	1,188	535	500	750	450
3.	Jumlah Eksamplar Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	-	400	2,716	1,371	60.000	156.000	41.000
4.	Desa /Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku	277	18	154	95	60	156	-
5.	Presentase Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Bintek	13%	1%	7%	5%	3%	8%	0%

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.2. Fokus Urusan Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.3.2.1. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pertanian

Kondisi pengembangan jaringan irigasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan yang cukup baik sejak tahun 2008 hingga 2014. Walaupun demikian karena beberapa kendala teknis tidak semua lahan yang beririgasi mulai dari irigasi teknis hingga irigasi tadah hujan ada yang tidak dimanfaatkan. Keadaan pemanfaatan irigasi di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :



Tabel 68. Keadaan Pengairan Irigasi, Tadah Hujan, Rawa Pasang Surut dan Rawa Lebak berdasarkan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) di Sulawesi Tenggara Tahun 2014

No.	Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman			Tidak Ditanami Padi *)	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
		Tiga kali	Dua kali	Satu kali			
1	Irigasi	50	63.516	16.021	4.773	8.941	93.301
2	Tadah Hujan	-	2.631	13.942	2.915	7.025	26.513
3	Rawa Pasang Surut	-	174	358	97	924	1.553
4	Rawa Lebak	-	32	102	6	38	178
	J U M L A H	50	66.353	30.423	7.791	16.928	121.545

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.2.2. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kehutanan

Perkembangan pengelolaan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara terus dilakukan berupa kegiatan rehabilitasi hutan, pengembangan produksi hasil hutan, pengamanan kebakaran kawasan hutan, pengawasan hutan, penetapan tata batas kawasan hutan serta perencanaan pembangunan kehutanan. Kondisi pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 69. Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 - 2014

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Capaian pada Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Kawasan Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi (ha)	85.95	977.05	86.76	20.379.70	38.832	1.894,16	2.253,88
2.	Produksi Hasil Hutan :	99.237.09	94.200,42	79.370,57	85.628,63	89.219,55		
	Hasil Hutan Kayu (m ³)	95.724,55	92.765,83	77.045.08	83.223,88	68.566.08	25.089,114	33.385,937
	Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	3.512,54	1.434,58	2.325,49	2.404,75	20.653,47	-	-
3.	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kasus Kejahatan Kehutanan (%)	100	100	100	100	80	-	-
4.	Luas Kawasan Hutan yang Terbakar Dapat Ditekan (%)	100	100	100	100	80	-	-
5.	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan (dokumen)	3	2	2	2	3	-	-
6.	Pengesahan Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan (dokumen)	-	-	-	5	10	-	-
7.	Fasilitasi Pembangunan HTR (kabupaten)	2	1	2	-	-	-	-
8.	Fasilitasi Pembangunan KPH (unit)	25	2 unit	-	2 unit	-	-	-
9.	Fasilitasi Hutan Kota (kabupaten)	-	-	3	7	-	-	-



Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.2.3. Pelayanan Umum Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Bidang energi dan sumberdaya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah. Selain itu, komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dan sumber daya mineral dengan berupaya untuk mengatasi defisit daya listrik di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2009 diwujudkan dengan cara merelokasi genset melalui dukungan APBD, tahun 2011 PT. PLN (Persero) telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas terpasang 2x10 mw, PLTM Rongi 2x0,4 mw, PLTM Sabilambo kapasitas 2x1 MW. Dalam mengatasi krisis listrik skala kecil pada daerah-daerah terpencil telah dikembangkan listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2008 s.d 2012 telah dikembangkan PLTS sebanyak 6.920 unit dan pada tahun 2009 pemerintah daerah telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) kapasitas 40 kW di Desa Tekonea Kab. Konawe.

Adapun capaian kinerja pelayanan umum bidang urusan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 70. Kondisi Pengelolaan Bidang Energi Sumberdaya dan Mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penerimaan Daerah dari sektor Pertambangan	60.855.129.327	103.115.397.967	91.383.706.647	96.099.387.776	48.427.718.084
	- Royalti	14.518.085.420	17.033.581.830	31.051.523.134	53.883.523.510	45.380.191.517
	- Iuran Tetap	892.267.287	1.023.969.736	1.543.551.661	2.031.864.266	3.047.526.567
	- Sumbangan Pihak Ketiga	45.444.776.620	85.057.846.401	58.788.631.852	40.184.000.000	-
2.	Rasio Elektrifikasi (%)	50,95	57,59	61,95	69,53	74,07
3.	Rasio Desa Berlistrik (%)	69,28	72,32	74,34	77,37	83
4.	Daya Terpasang (mw)	130.300	151.300	174.300	277.54	438.91

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015

a. Pertambangan

Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 71. Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara

Tahun	Produksi (ton)			Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah)		
	Biji Nikel	Fero Nikel	Aspal	Biji Nikel	Fero Nikel	Aspal
2009	3.677.298,54	14.190	62.392	1.048.030.083.900	2.298.780.000.000	18.717.516.000.000
2010	6.062.828	12.783	20.852,25	1.048.030.083.900	2.070.846.000.000	6.255.675.000
2011	14.342.807,88	6.630	187.525	1.727.905.980.000	1.193.394.600.000	56.257.500.000
2012	18.778.406	17.250	531.038	4.694.601.507.500	2.932.500.000.000	159.311.448.000
2013	29.431.004	15.535	583.830	5.398.791.733.625	2.563.275.000.000	175.148.910.000
2014	1.387.480	16.851	275.290	138.714.000.000	1.152.608.400	27.529.000.000

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015



b. Listrik

Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan penambahan cabang dan ranting perusahaan listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 72. Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	493.598	529.977	547.924	547.890	524.017	546.024	607.186
Jumlah KK berlistrik	183.421	198.280	255.813	307.351	324.630	379.629	449.713
Rasio Elektrifikasi	37,16	41.00	46.69	56.13	61.95	69.53	74.07

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.2.4. Pelayanan Umum Bidang Urusan Pariwisata

Perkembangan Kepariwisata di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata.

Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 73. Perkembangan Capaian Kinerja Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Per-Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
	KEBUDAYAAN					
1	Kesenian (Indikator SPM)					
	1. Cakupan Kajian seni (%)	-	13,3%	13,3%	-	-
	2. Cakupan Fasilitas Seni (%)	29%	14%	29%	-	-
	3. Cakupan Gelar Seni (%)	100%	100%	50%	-	-
	4. Misi Kesenian (%)	100%	100%	100%	-	-
	5. Cakupan sumber Daya Manusia kesenian (%)	25%	25%	50%	-	-
	6. Cakupan Tempat (%)	100%	100%	100%	-	-
	7. Cakupan Organisasi (%)	66,67%	66,67%	66,67%	-	-
2	PARIWISATA					
	1. Jumlah wisatawan Mancanegara (orang)	9.949	4.966	14.725	16.097	15.122
	2. Jumlah wisatawan Nusantara (Orang)	1.547.144	2.119.721	2.061.536	2.303.603	2.311.310
	3. Tingkat Hunian Hotel (Persentase)					
	- Bintang	41,89	52,77	52,90	-	-
	- Non Bintang	33,18	33,25	33,82	-	-
	4. Perkembangan Jumlah Hotel	265	303	347	-	-
	5. Rata-rata lama tinggal (hari)					
	- Bintang	1,79	2,00	2,17	-	-
	- Non Bintang	1,58	1,56	1,63	-	-
	6. Jumlah Objek Wisata (Lokasi)	3	4	3	1	5
	7. Jumlah Desa Wisata (Lokasi)	8	19	29	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2015



2.3.2.5. Pelayanan Umum Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar kepada PDRB Sulawesi Tenggara dalam kelompok pertanian. Hal ini disebabkan karena wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya kelautan yang besar dan beragam juga merupakan salah satu sektor yang diminati investor. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 74. Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2010 – 2014

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	FUNGSI EKONOMI					
1.	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Provinsi (Triliun Rp.)	3,08	3,56	2,88	4,46	4,79
2.	Produksi Perikanan (Ribu ton)					
	- Perikanan Tangkap	227,24	237,27	252,00	150,8	159,9
	- Perikanan Budidaya	570,57	653,17	744,00	847,5	1.053,20
3.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Ribu)	700,30	518,34	867,90	398,32	6.175,03
4.	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	45,8	49,5	50,6	49,01	-
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (unit)	566	620	630	600	831
6.	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	106,20	107,19	108,52	106,9	106,22
B.	FUNGSI LINGKUNGAN					
1.	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta ha)	1,60	1,72	1,84	1,84	1,92
2.	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk Pulau Kecil Terluar yang Dikelola (pulau)	115	115	117	117	117
3.	Jumlah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)	109	105	118	118	126

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sultra, Tahun 2015

2.3.2.6. Pelayanan Umum Bidang Urusan Perdagangan, Industri

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 75. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2014

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2008	Jumlah Investor	2	7	9
2009	Jumlah Investor	-	4	4
2010	Jumlah Investor	1	5	6
2011	Jumlah Investor	1	11	12
2012	Jumlah Investor	-	5	5
2013	Jumlah Investor	-	-	-
2014	Jumlah Investor	-	-	-

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 76. Jumlah Investasi PMDN Tahun 2008 s.d 2014

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp).	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2008	4	38.025.000.00	3	12.684.496.06
2009	1	13.800.000.00	52	13.204.509,30
2010	2	16.531.800.00	75	14.539.228,33
2011	2	11.350.000.00	76	18.937.141,79
2012	3	25.500.000.00	77	18.807.354,91
2013	10	17.400.000.00	74	26.731.040,00
2014	80	23.200.000.00	84	61.644.673,00

Sumber : Data LKPM BPMD dan PTSP Prov. Sultra, Tahun 2015



Tabel 77. Jumlah Investasi PMA Tahun 2008 s.d 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2008	18	22.100.000,00	49	29.381.110,00
2009	21	1.343.492,00	81	1.106.108,04
2010	15	37.396,900	80	55.865,14
2011	25	310.893,59	123	891.239,34
2012	11	35.103.459,60	133	13.884.396,51
2013	140	17.400.000,00	142	28.598.628,40
2014	180	23.200.000,00	218	34.216.659,20

Sumber : Data LKPM BPMD dan PTSP Prov. Sultra, Tahun 2015

c. Perkembangan Sektor Industri Kecil

Perkembangan sektor industri kecil di Sulawesi Tenggara terus berkembang sejak tahun 2008 hingga tahun 2014. Perkembangan perusahaan, jumlah tenaga kerja investasi dan nilainya terhadap industri kimia, industri logam dan industri aneka disajikan pada tabel berikut :

Tabel 78. Banyaknya Industri, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Tahun 2014

Kelompok / Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Nilai (Rp.000)
Industri Kimia	6	417	32.695.803	65.527.001
Industri Logam dan Mesin	3	690	29.551.883	2.500.011.218
Industri Aneka	-	-	-	-
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	46	1.506	364.784.577	110.435.564
Industri Kecil :	6.093	26.261	867.692.566	1.463.641.557
- IK Hasil Pertanian	1.443	8.077	153.172.658	686.479.914
- IK Kimia	1.240	8.267	84.828.281	195.277.104
- IK Logam dan Mesin	2.525	15.597	107.231.643	311.515.775
- IK Aneka				
Jumlah	11.301	58.202	1.212.925.148	2.656.914.350

Sumber : Laporan Kinerja Bidang Industri Kecil Tahun 2015

d. Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri

a. Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Nilai dan Volume

Dari Tahun 2008 hingga Tahun 2014 volume dan ekspor Sulawesi Tenggara terus meningkat, terutama nilai ekspor yang terjadi pada tahun 2013. Volume dan nilai ekspor Tahun 2008 hingga Tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 79. Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2008-2014

Deskripsi	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volume (Ton)	2.337.816,43	2.034.241,81	3.069.386,60	5.783.205,56	14.053.328,97	22.179.857,10	1.896.916,65
Nilai (USD)	463.197.880,00	199.898.650,00	334.550.042,00	440.772.202,74	703.334.264,44	765.857.144,55	333.012.160,80

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra Tahun 2015



b. Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Eksportir

Perkembangan eksportir di Sulawesi Tenggara bertambah secara signifikan, baik eksportir yang mengelola sumberdaya alam yang terbaharui maupun seperti perkebunan, hasil laut serta sumberdaya alam yang tidak terbaharui seperti hasil tambang. Perkembangan eksportir sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2014 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 80. Keadaan Jumlah Eksportir di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014

Tahun	Jumlah Eksportir	Jenis Komoditi	Nilai (USD)	Volume (Ton)
2008	7 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel)Hasil Laut (Bambu Laut)Hasil Perkebunan (Kakao)	463.197.880,00	2.337.816,43
2009	8 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel)Hasil Perkebunan (Kakao)	199.898.650,00	2.034.241,81
2010	22 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Batu Cromid)Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Ikan, Udang, Campuran)Hasil Hutan (Kayu Jati)Hasil Perkebunan (Kakao)	334.550.042,00	3.069.386,60
2011	26 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal)Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Ikan, Udang, Campuran, Rumput Laut)Hasil Hutan (Kayu Jati)	440.772.202,74	5.783.205,56
2012	38 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal)Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Rumput Laut)Hasil Hutan (Kayu Jati)	703.334.264,44	14.053.328,97
2013	46 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal)Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Rumput Laut, Campuran)Hasil Hutan (Kayu Jati)	765.857.144,55	22.179.857,10
2014	23 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal)Hasil Laut (Gurita Beku, Cakalang, Rumput Laut, Campuran)Hasil Hutan (Kayu Jati)	333.012.160,80	1.896.916,65

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015

c. Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan

Sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2014, jumlah negara tujuan ekspor Sulawesi Tenggara terus meningkat, baik negara tujuan, nilai maupun volume, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 81. Ekspor Berdasarkan **Negara Tujuan Tahun 2008-2014**

Tahun	Negara Tujuan	Nilai (USD)	Volume (Ton)
2008	Jepang, China, Malaysia, India, Korea Selatan, Swiss, Belgia	463.197.880,00	2.337.816,43
2009	Jepang, China, USA, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swiss	199.898.650,00	2.034.241,81
2010	Jepang, China, USA, Hongkong, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swiss, Australia, Italia	334.550.042,00	3.069.386,60
2011	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Italia, dan Yunani	440.772.202,74	5.783.205,56
2012	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Thailand, Meksiko, Ukraina	703.334.264,44	14.053.328,97
2013	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina	765.857.144,55	22.179.857,10
2014	Jepang, China, USA, Australia, Netherland, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, India	333.012.160,80	1.896.916,65

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015

d. Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Pelabuhan Muat

Jumlah pelabuhan yang digunakan untuk mengekspor komoditas dari Sulawesi Tenggara terus meningkat, baik dari sisi negara tujuan, maupun volume ekspor seperti pada tabel berikut :

Tabel 82. Ekspor Berdasarkan Pelabuhan Muat di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2015

Tahun	Pelabuhan Muat	Jenis Komoditi	Negara Tujuan	Volume (Ton)
2008	<ul style="list-style-type: none"> Pomalaa Kolaka Kendari 	<ul style="list-style-type: none"> Bijih Nikel, Fero Nikel Kakao Ikan Campuran 	Jepang, China, Malaysia, India, Korea Selatan, Swiss, Belgia	2.337.816,43
2009	<ul style="list-style-type: none"> Pomalaa Kolaka Konawe Selatan Bombana 	<ul style="list-style-type: none"> Bijih Nikel, Fero Nikel Kakao 	Jepang, China, USA, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swiss	2.034.241,81
2010	<ul style="list-style-type: none"> Pomalaa Kolaka Kendari Kolaka Utara Konawe Utara Konawe Selatan Buton Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid Kakao Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut Kayu Jati 	Jepang, China, USA, Hongkong, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Swiss, Australia, Italia	3.069.386,60
2011	<ul style="list-style-type: none"> Pomalaa Kolaka Konawe Utara Kolaka Utara Konawe Selatan Baubau Buton Bombana Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid Kakao Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut Kayu Jati 	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Italia, dan Yunani	5.783.205,56
2012	<ul style="list-style-type: none"> Pomalaa Kolaka Kolaka Utara 	<ul style="list-style-type: none"> Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Cromid Kakao 	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Thailand, Meksiko,	14.053.328,97



	<ul style="list-style-type: none"> Konawe Utara Konawe Selatan Buton Makassar Bombana Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Ikan Campuran, Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut Kayu Jati 	Ukraina	
2013	<ul style="list-style-type: none"> Pomalaa Kolaka Kolaka Utara Konawe Utara Konawe Selatan Buton Makassar Bombana Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Aspal, Batu Chromid) Hasil Laut (Gurita Beku, Ikan Cakalang, Rumput Laut) Hasil Hutan (Kayu Jati) 	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina	22.179.857,10
2014	<ul style="list-style-type: none"> Torobulu/ Konawe Selatan Tinanggea/Konawe Selatan Palangga/Konawe Selatan Mandiodo Konawe Utara Molore Konawe Utara Lameruru/Konawe Utara Boenaga/Konawe Utara Talaga /Bombana Kabaena/ Bombana Kabaena/Buton Baubau Pomalaa Wolo/Kolaka Lambai/Kolaka Utara Lasusua/Kolaka Utara Sulabo/Kolaka Utara Ujung Pandang Tj. Perak/Surabaya Tj. Priok/Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Tambang (Bijih Nikel, Fero Nikel, Batu/Bitumen Alam, Aspal) Hasil Laut & Perikanan (Gurita Beku, Cakalang Beku, Cumi-Cumi Beku, Rumput Laut, Hasil Laut Beku) Hasil Hutan (Kayu Jati) 	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Australia, Mexico, India, Belanda, Korea Selatan, Thailand	1.896.916,65

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015

e. *Perkembangan Sektor Perdagangan Dalam Negeri*

1) *Perdagangan Antar Pulau*

Jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau antara lain komoditas perkebunan, peternakan, kehutanan dan industri. Keadaan jenis, volume dan nilai perdagangan antar pulau ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 83. Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

Jenis Komoditi	Volume (Ton)	Nilai (Rp.000)
Hasil Tanaman Pangan	5.648	20.455.573.000
Hasil Perkebunan	271.641	5.783.000.415.000
Hasil Perikanan	49.838	1.589.475.160.000
Hasil Peternakan	97	1.330.000.000
Hasil Kehutanan	120	2.210.000.000
Produk Industri	495	41.188.000.000
JUMLAH	327.839	7.437.659.148.000

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra Tahun 2015



f. Perkembangan Harga Bahan Pokok Pangan

Tabel 84. Harga Rata-Rata Bahan Pokok Pangan Tahun 2008-2014

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beras :								
Konawe	kg	4.381	5.330	6.050	6.400	7.400	7.200	7.521
48		3.950	5.400	6.217	6.400	7.400	7.200	7.523
Ciliwung		4.062	5.371	6.217	6.400	7.400	7.200	7.502
Gula Pasir :								
Dalam negeri (putih)	kg	6.620	8.729	11.167	10.895	12.672	12.399	12.343
Dalam negeri (kuning)		6.600	8.000	10.400	10.183	12.067	12.399	
Minyak Goreng :								
Bimoli	lt	12.700	13.766	13.600	12.845	13.907	14.000	14.992
Tanpa merek		6.100	9.164	9.167	8.171	9.292	9.897	10.430
Daging :								
Sapi Murni	kg	60.000	71.000	71.000	72.750	73.367	80.438	85.598
Ayam broiler		32.750	22.002	26.800	22.456	30.000	49.755	33.921
Ayam kampung		46.900	50.851	45.000	60.500	50.000	70.930	68.242
Telur :								
Ayam broiler	kg	16.000	15.534	18.048	15.751	17.690	19.381	20.209
Ayam kampung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.440	2.442
Itik		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.440	2.381
Susu :								
kental manis	397 gr/kl	15.750	16.500	18.500	16.500	18.500	9.500	9.367
bubuk	400 gr/kl	65.900	94.214	100.991	102.918	103.000	28.240	39.373
Jagung Pipilan Kering	kg	3.750	4.087	4.080	4.807	5.000	5.000	8.284
Garam Beryodium :								
Halus	kg	1.400	3.929	6.500	6.500	6.500	6.500	6.700
Kasar		1.200	1.910	4.500	4.500	4.500	4.500	4.308
Tepung Terigu :								
Kompas	kg	7.400	7.989	7.387	7.620	7.963	8.000	8.335
Gatot kaca		7.000	7.453	6.593	6.909	7.463	7.500	7.569
Kacang :								
Kedelai lokal	kg	8.000	9.113	12.000	10.093	10.357	12.950	17.480
Hijau		10.500	12.755	12.353	12.305	10.915	12.960	17.056
Tanah		10.000	11.983	12.333	11.516	12.331	12.774	13.191
Cabe Merah :								
Keriting	kg	20.000	18.590	11.749	27.335	22.181	31.173	24.061
Besar		15.500	18.350	13.305	26.056	21.283	30.036	25.634
Rawit		24.500	25.000	27.500	30.000	39.142	78.169	53.619
Bawang :								
Merah	kg	16.400	17.085	15.797	22.268	17.799	39.565	28.721
Putih		20.500	12.336	21.840	25.234	19.207	20.832	19.029
Ikan Asin :								
Teri kw.1	Kg	59.000	63.365	59.607	62.898	60.517	94.088	104.562
Teri kw.2		49.000	49.954	48.240	48.686	51.792	83.669	88.592
Teri kw.3		33.200	38.529	35.865	37.004	30.063	30.742	58.269
Sunu		35.000	51.360	50.000	49.375	50.805	86.742	83.764
Campuran		29.000	30.000	32.500	35.000	-	-	-
Ketela Pohon	Kg	5.000	4.696	4.848	5.000	5.667	9.976	10.000
Kelapa Biji	buah	2.950	3.000	2.900	2.711	3.333	3.000	3.536
Minyak Tanah	Lt	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	7.374
Sayur mayur :								
Buncis	Kg	7.200	7.200	7.788	9.846	11.876	-	-
Kol		7.200	7.200	7.661	10.367	7.913	8.208	7.964
Tomat		8.300	8.300	7.240	7.079	6.366	6.313	8.739

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sultra, Tahun 2015



2.3.2.7. Pelayanan Umum Bidang Urusan Ketransmigrasian

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi terbanyak di Indonesia. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 1964. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 1998 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 85. Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi 1998/1999 - 2014

Tahun	Umum		Transmigrasi Swakarsa Mandiri		Total	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1998/1999	705	2.793	-	-	705	2.793
1999/2000	700	3.222	-	-	700	3.222
2000	500	1.948	-	-	500	1.948
2001	790	3.344	-	-	790	3.344
2002	650	2.712	550	2.526	1.200	5.238
2003	300	1.323	3.635	8.333	3.935	9.656
2004	600	2.389	167	668	767	3.057
2005	350	1.411	-	-	350	1.411
2006	250	966	130	479	380	1.445
2007	430	1.718	50	150	480	1.868
2008	250	938	100	493	350	1.431
2009	98	389	130	530	228	919
2010	442	1.755	158	638	600	2.393
2011	748	2.957	86	317	834	3.274
2012	665	2.535	5	19	670	2.554
2013	367	1.432	40	140	407	1.572
2014	261	1.041	0	0	261	1.041
Jumlah	8.106	32.873	5.051	14.293	13.157	47.166

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 86. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 - 2014

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi	Persen		10,63	11,65	7,51	6,26
PDRB / Kapita tahun dasar 2010	Rupiah	21.573.111	24.302.105	27.582.584	29.641.133	32.115.109
PDRB / Kapita tahun dasar 2000	Rupiah	12.647.863	13.996.317	15.624.833	17.048.961	18.305.499
Inflasi	Persen	3,87	5,09	5,25	5,92	7,4
Tingkat Kemiskinan	Persen	15,69	14,61	13,05	13,73	12,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,61	3,06	4,04	4,46	4,43
Indeks Gini		0,42	0,41	0,40	0,43	0,41
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,10	8,20	8,30	8,41	8,68
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Persen	91,85	91,29	91,49	92,61	94,03

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015



2.4.1.1. PDRB Per Kapita

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB per kapita. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2012 adalah 15.526,33 ribu rupiah. Nilai tersebut telah meningkat 11,65 persen dari keadaan tahun 2011. Pertumbuhan PDRB per kapita itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga produksi. Hal itu dapat ditunjukkan dengan peningkatan indeks implisit yang bergerak dari 256,61 tahun 2011 menjadi 263,80 pada tahun 2012.

Tabel 87. PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara, 2010-2014

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2010	21.572,99	21.572,99
2011	24.302,02	23.338,07
2012	27.582,17	25.489,79
2013*	29.641,29	26.817,47
2014**	32.114,86	27.898,88

** Angka sangat sementara

*Angka Sementara

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Tabel 88. PDRB Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 2010-2014

Tahun	2010	2011	2012	2013*	2014**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.438.020,25	28.223.869,28	32.397.970,96	36.456.759,47	40.438.423,10

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015

Tabel 89. Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**)
1.	Total Pengeluaran RT	-	-	-	-	483.531.03
2.	Jumlah RT	-	-	-	-	518.808.00
3.	Rasio (1./2.)	-	-	-	-	0,93

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2012



Tabel 90. Angka Konsumsi RT per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran RT	Jumlah RT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Buton	261.108,02	56.297	4,64
2	Muna	353.221,63	62.517	5,65
3	Konawe	474.625,63	55.264	8,59
4	Kolaka	571.118,06	72.945	7,83
5	Konawe Selatan	403.607,88	65.589	6,15
6	Bombana	422.954,12	32.898	12,86
7	Wakatobi	471.307,50	24.321	19,38
8	Kolaka Utara	535.427,44	27.511	19,46
9	Buton Utara	379.434,94	12.404	30,59
10	Konawe Utara	503.612,79	11.534	43,66
11	Kota Kendari	762.203,69	66.188	11,52
12	Kota Baubau	591.686,04	31.340	18,88
	Standar provinsi	483.531,03	518.808	0,93

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2012

2.4.1.3. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Tabel 91. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008-2014 Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Indeks yang Diterima Petani (It)	119,53	133,41	136,83	139,80	142,78	109,10	116,41
2.	Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	116,47	121,37	127,50	130,08	134,41	107,08	116,84
3.	Rasio	1,03	1,10	1,07	1,07	1,06	1,02	0,99

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015

2.4.1.4. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Tabel 92. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	243.496,76	-	-	283.688	298.958
2.	Total Pengeluaran	483.531,03	-	-	569.296	592.139
3.	Rasio	0,50	-	-	0,49	0,50

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015



Tabel 93. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Rt Non Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Buton	145.735	344.420	0,42
2.	Muna	221.916	473.041	0,46
3.	Konawe	292.348	576.045	0,50
4.	Kolaka	366.495	758.649	0,48
5.	Konawe Selatan	224.450	467.802	0,47
6.	Bombana	187.030	446.628	0,41
7.	Wakatobi	277.899	571.011	0,48
8.	Kolaka Utara	273.134	553.831	0,49
9.	Buton Utara	213.761	478.289	0,44
10.	Konawe Utara	255.729	550.638	0,46
11.	Kota Kendari	525.640	893.191	0,58
12.	Kota Baubau	402.614	709.552	0,56
	Provinsi	298.958	592.139	0,50

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2015

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.4.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Beberapa tahapan pembahasan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara penyusunan dokumen materi teknik, ranperda dan perpetaan telah selesai disusun. Saat ini telah diserahkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembahasan dan penetapan.

2.4.2.2. Luas Wilayah Produktif

Pada tahun 2011, luas lahan produktif yang terdiri dari kawasan pertanian, permukiman dan areal lainnya adalah seluas 1.870.943 ha. Secara keseluruhan luas wilayah budidaya adalah 2.236.770 ha. Dengan demikian rasio lahan produktif dan wilayah budidaya adalah 0.836, artinya masih cukup luas wilayah budidaya dibanding lahan produktif.

Tabel 94. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Luas wilayah produktif	1.599.865	1.628.841	1.705.922	1.870.943
2.	Luas seluruh wilayah budidaya	2.478.661	2.478.661	2.478.661	2.236.770
3.	Rasio (1./2.)	0.645	0.657	0.688	0.836

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2012



Luas lahan produktif setiap kabupaten adalah lahan yang terdiri dari pekarangan, lahan pertanian dalam arti luas dan lahan perkantoran. Luas lahan produktif perkabupaten se Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

Tabel 95. Persentase luas Wilayah Lahan Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Buton	16.241	23.815	0,68
2	Muna	130.841	237.181	0,55
3	Konawe	147.593	235.500	0,63
4	Kolaka	30.415	83.438	0,36
5	Konawe Selatan	21.146	20.678	1,02
6	Bombana	318.109	363.155	0,88
7	Wakatobi	73.394	137.835	0,53
8	Kolaka Utara	412.481	339.817	1,21
9	Buton Utara	259.213	308.224	0,84
10	Konawe Utara	239.385	235.887	1,01
11	Kota Kendari	189.191	215.723	0,88
12	Kota Baubau	32.934	35.517	0,93
	Jumlah	1.870.940	2.236.770	0,84

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2012

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 96. Kejadian Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 – 2014

JENIS KRIMINAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Tindak Kriminal Selama	3.848	4.130	3.653	9.414	7.618	7.138

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

Tabel 97. Angka Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Kasus Narkoba	-	5	10	-	-	-	-
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	-	26	31	34	-	29	31
3	Jumlah Kejahatan Perkosaan	-	45	67	61	-	61	79
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	-	1.470	1.563	51	-	1.693	1.768
5	Jumlah Kasus Pencurian	-	1.745	1.762	606	-	1.846	1.940
6	Jumlah Kasus Penipuan	-	348	41	599	-	449	400



7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	1	7	-	-	-	-
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	3.407	7.107	7.836	3.653	9.414	7.618	7.138
9	Jumlah Penduduk							
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)							

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015

2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Kejadian demonstrasi di Sulawesi Tenggara berdasarkan pembidangnya terus meningkat sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Keadaan demonstrasi di Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 98. Jumlah Demo yang Terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**)	JUMLAH
1	Bidang Politik	17	51	347	456	145	1.016
2	Ekonomi	7	22	46	-	151	226
3	Kasus Pemogokan Kerja	1	3	-	-	6	10
4	Sosial Budaya	9	33	174	37	161	414
5	Jumlah Unjuk Rasa	34	109	567	493	463	1.666

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2012

2.4.3.3. Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintahan

a. Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintahan

Salah satu upaya peningkatan kinerja pemerintahan dilakukan melalui pengembangan kompetensi pegawai negeri yaitu dengan pelaksanaan diklat PIM, diklat Teknis Fungsional dan sertifikasi. Sampai dengan Tahun 2012 telah dilakukan diklat sebagai berikut :

- 1) Diklat PIM ; Prajabatan Gol II, III, IV : 3.381 orang
- 2) Diklat Teknis Fungsional 220 orang
- 3) Sertifikasi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik 98 orang
- 4) Sertifikasi Pelayanan Terpadu 30 orang

b. Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Untuk menjamin transparansi dan menciptakan akuntabilitas dan efisiensi maka pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendirikan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

c. Produk Hukum

Total produk hukum yang dihasilkan selama kurun waktu tahun 2008 – 2014 adalah sebanyak 6.093 keputusan yang meliputi : 77 PERDA ; 513 PERGUB ; 5.219 SK dan 284 MOU, secara rinci perkembangan penetapan keputusan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 99. Produk Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014

Tahun	Peraturan Daerah	Peraturan Gubernur	Keputusan . Gubernur	MOU
2008	9	78	828	14
2009	8	84	845	23
2010	7	54	865	30
2011	11	48	523	58
2012	13	33	549	22
2013	15	136	834	70
2014	14	80	775	67
Jumlah	77	513	5.219	284

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Sultra, Tahun 2015



d. Penegakan Hukum

Penyelesaian perkara yaitu berupa gugatan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi selama tahun 2008 – 2014 adalah sebanyak 58 perkara dengan rincian :

- 1) Tahun 2008 sebanyak 6 perkara
- 2) Tahun 2009 sebanyak 5 perkara
- 3) Tahun 2010 sebanyak 10 perkara
- 4) Tahun 2011 sebanyak 6 perkara
- 5) Tahun 2012 sebanyak 6 perkara
- 6) Tahun 2013 sebanyak 8 perkara
- 7) Tahun 2014 sebanyak 4 perkara
- 8) Tahun 2015 sebanyak 13 perkara

e. Pengamanan dan Ketenteraman Masyarakat

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berupa pengamanan hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan, pengawalan massa, penegakan peraturan daerah dan operasi yustisi. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 100. Kegiatan Polisi Pamong Praja Tahun 2008 – 2014

Tahun	Hari Besar Keagamaan	Hari Besar Nasional	Penegakkan Perda	Operasi Yustisi
2008	3	2	85	2
2009	3	1	80	3
2010	3	0	90	5
2011	3	3	259	8
2012	11	8	10	20
2013	11	8	14	23
2014	11	8	19	27

Sumber : Kantor Sat. Pol PP, Tahun 2015

2.4.3.2. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004-2014 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 101. Jumlah dan Macam Pajak di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 – 2014

Tahun	Realisasi Pajak			
	PKB	BBN-KB	PBB-KB	PABT/AP
2004	18.100.584	32.775.436	13.438.484	1.350.361
2005	19.519.565	34.419.791	18.005.618	667.815
2006	21.465.463	30.646.059	31.998.924	423.435
2007	24.323.177	36.643.562	38.543.562	485.892
2008	32.669.069	62.804.850	52.956.844	1.252.548
2009	38.934.276	76.631.937	52.017.350	1.690.452
2010	46.054.047	92.416.924	60.268.263	1.707.214
2011	55.754.959	122.242.806	80.461.325	1.785.402
2012	63.907.118	169.678.358	102.143.424	2.221.563
2013	76.658.718	202.302.466	123.462.831	2.269.633
2014	83.927.498	175.784.490	119.835.722	1.977.765

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015



Tabel 102. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2014

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)
Jumlah Investor Asing Berskala Nasional (PMA)	218
Jumlah Investor Domestik Berskala Nasional (PMDN)	84
Nilai Realisasi Investasi Asing (PMA) – US\$ Ribu	254.285'
Nilai Realisasi Investasi Domestik (PMDN) – Rp. Miliar	5.314
Persentase Pertumbuhan Investasi	
PMA	19,64%
PMDN	130,61%
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Terhadap Investasi	%

Sumber : Data LKPM BPMD dan PTSP Prov. Sultra, Tahun 2015

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1)

Peningkatan pelatihan yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 terus meningkat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 103. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan, Keahlian dan Kompetensi Tenaga Kerja

No.	Kegiatan	Tahun/Orang						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pelatihan Berbasis Kompetensi	130	380	380	464	1.600	1.221	1.940
2.	Pelatihan Berbasis Masyarakat	697	480	480	480	380	400	500
3.	Pelatihan Kewirausahaan	110	2.360	2.360	300	480	510	960
	Jumlah	937	506	642	1.244	2.360	2.131	3.400

Sumber : Sultra Dalam Angka & D. Nakertrans, Tahun 2015

**Tabel 104. Rasio Lulusan S1 Tahun 2008-2012
Provinsi Sulawesi Tenggara**

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**)
1.	Jumlah Lulusan S1	13.702	7.052	7.333	13.814	-

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2012

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

**Tabel 105. Rasio Ketergantungan Tahun 2008-2012
Provinsi Sulawesi Tenggara**

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	729.624	737.576	782.924	789.112	-
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	132.750	137.979	130.182	132.810	-
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	862.374	875.555	913.106	921.922	-
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	1.212.600	1.242.745	1.319.480	1.346.094	-
5.	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	0,71	0,70	0,69	0,68	-

Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2012